

VOLUME 4, (ISSUE 2, APRIL 2025)

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

**PERAN KEPEMIMPINAN PJ WALIKOTA RATU DEWA TERHADAP PREMANISME DI
KAWASAN WISATA KOTA PALEMBANG**

M. Sutarman, Taufik Akhyar, Deany Afriany, 61 - 75

**VALUASI TATA KELOLA KPU DAN BAWASLU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PILKADA 2024 : KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT**

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, 76-84

MOTIF POLITIK ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN

Adhari Febriansyah, Afif Musthofa Kawwami, 85-95

**TATA KELOLA PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN BERDASARKAN
PENIMBUNAN ANAK SUNGAI DI KOTA PALEMBANG**

Miftahul Azmi, Reni Rentika Waty, 96-108

**ANALISIS SENGKETA LAHAN DI KECAMATAN LUBUK RAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (PERSPEKTIF TEORI KONFLIK AGRARIA)**

Refliani Ristian, Taufik Akhyar, Deany Afriany, 109-118

VOLUME 4

ISSUE 2

PAGE
61 - 118

APRIL
2025

PUBLISH BY :

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
FATAH PALEMBANG**

PERAN KEPEMIMPINAN PJ WALIKOTA RATU DEWA TERHADAP PREMANISME DI KAWASAN WISATA KOTA PALEMBANG

M. Sutarman¹, Taufik Akhyar², Deany Afriany³

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

Email: mhmmmdstrmn@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by Ratu Dewa's leadership as Acting Mayor of Palembang who was able to carry out his role in overcoming the phenomenon of thuggery that occurred in the tourist area of Palembang City, precisely at Kuto Besak Fort and Ampera Bridge, which disturbed the surrounding community, especially tourists. This phenomenon is related to the leadership role of the acting mayor of Palembang (Queen Dewa) in committing to providing comfort and security for tourists visiting the city of Palembang. Meanwhile, data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The primary data sources in this research are the secretary of the Palembang City Civil Service Police Unit, and the tourist destination manager. Secondary data comes from books, journals and other written sources. In analyzing research using Role theory according to Mintzberg. The results of the research show that Ratu Dewa as a leader in overcoming acts. The results of the study indicate that Ratu Dewa as the Acting Mayor of Palembang carries out his role as the Acting Mayor with an interpersonal role. Ratu Dewa as a leader is able to direct the security team to provide direction to Danru, Kasi, Kabid by providing direction to each personnel for guidance from the center to maintain security. Relationship with information (informational role) Ratu Dewa openly obtains information from complaints from local people and tourists, and directly reviews the location of BKB and Ampera Bridge as one of the areas with thuggery. The role of decision-making (decisional role) Ratu Dewa designs the establishment mechanism by establishing an integrated post to carry out supervision carried out for 24 hours or operating for 24 hours..

Keywords: *Actions of Thuggishness, Tourist Destinations, Leadership Role.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kepemimpinan Ratu Dewa sebagai PJ Walikota Palembang yang mampu melaksanakan perannya dalam mengatasi fenomena aksi premanisme yang terjadi dikawasan wisata Kota Palembang tepatnya di Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera, yang meresahkan masyarakat sekitar, terutama wisatawan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer pada penelitian ini adalah sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dan pengelola destinasi wisata. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Dalam menganalisis penelitian menggunakan teori Peran menurut Mintzberg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ratu Dewa sebagai PJ Walikota Palembang menjalankan perannya sebagai PJ Walikota dengan peran antar pribadi (*interpersonal role*) Ratu Dewa sebagai pemimpin mampu mengarahkan tim keamanan memberikan arahan kepada Danru, Kasi, Kabid dengan memberikan arahan dengan setiap personil untuk bimbingan dari pusat untuk menjaga keamanan. Hubungan dengan informasi (*informational role*) Ratu Dewa secara terbuka memperoleh informasi dari keluhan masyarakat lokal

maupun wisatawan, dan melakukan secara langsung meninjau lokasi BKB dan jembatan ampera sebagai salah satu wilayah dengan aksi premanisme. Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*) Ratu Dewa merancang mekanisme pendirian dengan mendirikan posko terpadu guna melakukan pengawasan yang dilakukan selama 24 jam atau beroperasi selama 24 jam.

Kata Kunci: Aksi Premanisme, Destinasi Wisata, Peran Kepemimpinan

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi adalah maraknya aksi atau praktik premanisme di kalangan masyarakat. Menurut Anton dalam S. Budhi Raharjo istilah preman berasal dari kata *freeman* yang mengarah pada arti orang yang bebas (Raharjo, 2012). Tingkat perkembangan perilaku dari premanisme semakin mengarah pada hal negatif karena dianggap sebagai tindak kekerasan dan kriminal. Fenomena premanisme tidak dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan saja, namun juga mengarah pada korban dari sosial ekonomi yang tidak layak (Mustamant, 2013).

Kota Palembang tidak terlepas dari fenomena premanisme terutama di daerah kawasan wisata. Kasus terbaru pada awal tahun 2024 terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang preman yang berwujud sebagai pengamen di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Hal ini berawal dari datangnya bus pariwisata dari Lampung yang tidak memberikan uang pada saat pelaku mengamen yang berakhir dengan aksi pelaku meludahi salah satu penumpang. Aksi ini kemudian menyebar luas di platform media sosial (Siregar, 2024)

Dengan adanya fenomena ini menjadi sorotan masyarakat hingga ke pemerintah daerah, yang kemudian PJ walikota Ratu dewa terhadap komitmen memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan di kota Palembang. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 jo. Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Peraturan yang memuat mengenai penyelenggaraan pariwisata termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Destinasi Wisata. Dalam penangannya Wali Kota akan dibantu oleh Tim keamanan yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang. Dengan banyaknya kasus penodongan serta premanisme yang didapatkan oleh pariwisata yang sedang berkunjung ke kota Palembang terutama di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) dan jembatan Ampera.

Kasus ini sangat mencoreng nama baik kota Palembang, dan membuat para

wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang menjadi takut. Kasus penodongan yang dialami oleh salah satu pariwisata perempuan yang merupakan *tour guide* yang sedang mengajak turis atau kliennya berwisata dan berfoto-foto di icon kota Palembang yaitu jembatan ampera. Dimana saat ia sedang berjalan, wanita itu diikuti oleh pria bertopi dan berjaket memaksa meminta sejumlah uang dengan memegang pisau di tangan kanannya. Kejadian itu terjadi pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Kasus pemalakan yang terjadi di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang yang dilakukan oleh sekelompok preman kepada supir dan kernet bus yang membawa wisatawan ibu-ibu pengajian asal Lampung, Kejadian ini dialami oleh ayah dan anak yang berprofesi sebagai sopir dan kernet bus asal Lampung yang dikeroyok oleh preman di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang. Korban pun langsung melaporkan kasus pengeroyokan tersebut ke sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang. Kepada polisi, keduanya menuturkan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat 3 November 2023 sekitar pukul 18.00. Kejadian itu bermula ketika mereka membawa rombongan ibu-ibu pengajian asal Lampung berwisata ke Benteng Kuto Besak (BKB) di jalan SMB Kelurahan 19 ilir kecamatan IB I, Palembang.

Selain Benteng Kuto Besak (BKB), aksi premanisme juga terjadi di Kawasan Jembatan Ampera di mana salah seorang wisatawan wanita diancam menggunakan senjata tajam (sajam) oleh preman. Peristiwa itu terjadi saat kurang lebih 40 wisatawan hendak pulang menuju busnya dekat Masjid Agung Palembang. Kemudian, kasus pemalakan Aksi premanisme di sekitar Jembatan Ampera Palembang kembali terjadi. Seorang sopir angkot dianiaya karena tidak memberikan uang yang diminta pelaku.

Kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB) yang jadi ikon kota Palembang sering dirasakan dengan hadirnya pengamen. Keresahan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah kota (Pemkot) Palembang bersama aparat kepolisian dengan berhasil mengamankan pengamen yang melakukan aksi nekat masuk kedalam bus wisatawan dan menadahkan tangan meminta uang, namun tidak diberikan uang sehingga membuat kesal dan meludahi guide wisatawan tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas menjadi sorotan publik terutama pemerintah daerah, Ratu dewa sebagai PJ Walikota Palembang memberikan respon yang luar biasa dan berdedikasi terhadap fenomena premanisme ini, aksi ini dianggap sebagai penoda dari keamanan di Kota Palembang hingga memprihatinkan, hingga Ratu Dewa memberikan komitmen penuh dan akan terus berusaha menjaga keamanan Kota Palembang yang dibantu

oleh pihak lain yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi, yakni nilai yang belum terungkap, sehingga dalam penelitian, peneliti bertindak instrumen kunci. (Sugiyono, 2018) lingkup penelitian ini adalah sejauh mana peran Pj walikota Ratu Dewa terhadap komitmen memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap pariwisata di kota Palembang. Penelitian kualitatif sebuah metode penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya sebuah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, penelitian secara keseluruhan dilakukan di Kota Palembang.

Adapun data yang terdapat dalam penelitian bersumber dari data primer merupakan data utama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang dilakukan dengan mewawancarai informan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Misalnya, yang diperoleh peneliti dari buku-buku, internet, jurnal, berita dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul Peran Pj Walikota Ratu Dewan Terhadap Komitmen Memberikan Kenyamanan dan Keamanan Pariwisata di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Macam-macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif. Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan cara mengorganisasikan data memilih mana yang penting serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Milles, 2014). Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data yang telah terkumpul. Tahap-tahap yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Kepemimpinan Walikota terhadap Premanisme di Kawasan Wisata Kota Palembang

1. Peranan yang Memiliki Hubungan Pribadi (*Interpersonal Role*)

Dalam mewujudkan peran kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan hal yang berkaitan dengan otoritas serta status untuk dapat memberikan arahan atau motivasi kepada hal yang memiliki kaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal tersebut akan berkaitan dengan peran pribadi dari pemimpin, yang menjalankan perannya sebagai pemimpin dan pejabat perantara (Setiawan, 2017).

Aksi premanisme sebagai suatu tindakan yang meresahkan ketentraman masyarakat yang terlahir dari adanya suatu alasan sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan premanisme. Dengan adanya fenomena premanisme di suatu wilayah akan berkaitan dengan peran pribadi seorang pemimpin. Seperti halnya yang terjadi wilayah destinasi Kota Palembang yaitu Benteng Kuto Besak (BKB) dan Ampera yang kerap kali terjadi aksi premanisme seperti pemalakan yang dikaitkan dengan keberadaan sosok pemimpin yaitu PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa. PJ Ratu Dewa menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin dalam mengatasi aksi premanisme di Kota Palembang yang sempat menghebohkan.

Peran pribadi sebagai pemimpin (*Leader*) terlihat dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi dan mengarahkan tim keamanan Kota Palembang sebagai bawahan untuk turut serta secara langsung melakukan peninjauan ke lokasi destinasi wisata yang terjadi aksi premanisme. Peran pribadi sebagai pemimpin memiliki kaitan erat dengan bimbingan, arahan, motivasi untuk menciptakan suatu kondisi dimana memberikan dukungan kinerja pada bawahannya. Dalam memberikan arahan tersebut PJ Ratu Dewa melibatkan bawahannya seperti Danru, Kasi, Kabid dengan memberikan arahan dengan setiap personil untuk bimbingan dari pusat.

Peran sebagai pemimpin dalam indikator peran pribadi melibatkan pribadi dari sosok pemimpin sebagai kepribadian yang memiliki pengaruh yang besar untuk wilayah yang dipimpinnya. Dalam hal ini dikaitkan dengan sifat atau watak yang dimiliki oleh Ratu Dewa sebagai PJ Walikota dalam menangani aksi premanisme di beberapa kawasan wisata Kota Palembang. Kepemimpinan Ratu Dewa menunjukkan bahwa adanya sebuah keunggulan yang menyebabkan kepemimpinan beliau mempengaruhi bawahan.

Peran pemimpin sebagai pejabat perantara yang dimaksud adalah seorang pemimpin

yang melakukan perannya dengan interaksi kepada bawahan atau staf hingga orang lain yang berada di luar organisasinya untuk mendapat sebuah keterangan mengenai informasi tertentu (Trioctavia, 2016). Pada dasarnya pemimpin yang turut menjalankan perannya sebagai pejabat perantara dapat melakukan hubungan dengan memberikan berbagai solusi dari suatu permasalahan. Dalam hal ini PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan peran sebagai pejabat perantara dengan menerima informasi terkait aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang, secara terbuka kepada seluruh masyarakat.

Peran sebagai pejabat perantara penting dilakukan oleh seorang pemimpin untuk turut menjalin hubungan dengan semua kalangan. Hal ini dilakukan agar pemimpin dapat menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat dan segala fenomena yang meresahkan yang terjadi di wilayah kekuasaannya seperti halnya aksi premanisme yang terjadi di kawasan wisata Kota Palembang. PJ Ratu Dewa tidak hanya menerima keluhan dari bawahannya melainkan juga dari masyarakat setempat dan masyarakat wisatawan. Sehingga kawasan yang dimaksud mendapat perhatian lebih oleh PJ Walikota dan pihak keamanan lainnya.

Peran antar pribadi (*interpersonal role*) dalam peran kepemimpinan harus melihat tindakan dari pemimpin dalam berbagai situasi atau keadaan yang akan menjadi penghubung antara pihak satu dengan pihak yang lain dalam mengatasi permasalahan. Peran antar pribadi dari kepemimpinan dapat diukur berdasarkan indikator perannya sebagai pemimpin merujuk pada sikap, ketegasan, dan karakteristik, serta indikator peran pejabat perantara yang mengarah pada kemampuan pemimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Toby Samuel Tampubolon (2024), peran pribadi yang dimiliki oleh pemimpin merujuk pada adanya hubungan untuk menciptakan keharmonisan dalam suatu lingkungan wisata untuk menjalankan visi dan misi dari destinasi wisata suatu tempat. Adanya komunikasi yang terjalin baik antara pemimpin dengan bawahan sebagai bukti bahwa adanya peran pribadi yang dilibatkan dalam suatu kepemimpinan. Salah satu cara yang dinilai efektif untuk melihat bahwa seorang pemimpin menjalankan peran pribadinya kepada bawahan dengan melihat aktivitas apel rutin untuk menyampaikan ide atau gagasan seorang pemimpin (Tampubolon, 2024).

2. Peranan yang memiliki hubungan dengan informasi (*informational role*)

Dalam pelaksanaan peran kepemimpinan tidak akan terlepas dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin untuk dapat memperhatikan wilayah yang dipimpinnya dengan berbagai program untuk dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pemimpin akan

melakukan hubungan untuk memperoleh informasi dari luar, informasi yang telah diperoleh harus dikelola kemudian dibagikan kepada pihak yang dianggap terlibat. Maka dari itu, sosok pemimpin selain menjalankan perannya hubungan antar pribadi juga memiliki peran dalam mengelola informasi (Setiawan, 2017).

Pemimpin memiliki peran dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang mengarah pada ketentraman suatu wilayah kekuasaannya. Dalam memperoleh informasi pemimpin melakukan berbagai hal sesuai dengan karakteristik kepemimpinannya. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara terbuka memperoleh informasi dari keluhan masyarakat lokal maupun wisatawan, dengan adanya keluhan tersebut sebagai seorang pemimpin PJ Ratu Dewa pernah secara langsung meninjau lokasi Benteng Kuto Besak sebagai salah satu wilayah dengan aksi premanisme.

Pemimpin sebagai pengumpul informasi atau penerima informasi dan memiliki suatu kemampuan untuk dapat melakukan suatu pengembangan mengenai aksi premanisme di kawasan BKB dan ampera dan akan memahami secara utuh mengenai lingkungan tersebut. Pemimpin pemegang kekuasaan suatu wilayah harus menyadari akan perannya untuk dapat memperoleh informasi dalam segala hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat, hal ini akan menunjukkan adanya kesiapan dari yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan peran kepemimpinannya dalam suatu kekuasaan dalam wilayah.

Setelah memperoleh informasi, pemimpin harus memiliki kesadaran akan perannya dalam mengelola informasi tersebut. Pengelolaan disini mengarah pada rancangan perencanaan dalam mengatasi aksi premanisme yang terjadi di kawasan wisata BKB dan Jembatan Ampera. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa selama menjabat sebagai seorang pemimpin telah mampu mengelola informasi yang mengarah pada perencanaan hingga pelaksanaan dalam mengatasi aksi tersebut.

Kemampuan dalam mengelola informasi mengenai aksi premanisme di kawasan BKB dan Jembatan Ampera telah dilakukan oleh PJ Ratu Dewa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. Hasil dari pengelolaan tersebut untuk wilayah BKB dan Ampera sebagai destinasi wisata Kota Palembang semakin terjaga dan diperhatikan, karena memiliki nilai jual kepada wisatawan dengan memberikan kenyamanan dan ketenangan atau terhindar dari aksi premanisme dalam bentuk apapun.

Selain menjalankan peran untuk memperoleh informasi, seorang pemimpin juga memiliki peran untuk menyebarkan informasi. Dalam penelitian ini indikator tersebut digunakan untuk melihat PJ Walikota Ratu Dewa sebagai pemimpin menjalankan perannya

untuk dapat menyebarkan informasi atau memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat mengenai aksi premanisme di kawasan wisata BKB dan Ampera.

Hail temuan dapat tergambarkan PJ Ratu Dewa dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan menyebarkan informasi secara cepat kepada pihak keamanan yang memiliki kaitan erat untuk membantu mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang terutama di BKB dan Ampera. Kemudian, terdapat hasil wawancara kepada Lukman salah satu pengelola tempat di Benteng Kuto Besak mengenai penyebaran informasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Palembang.

PJ Walikota Palembang Ratu Dewa telah menyebarkan informasi mengenai aksi premanisme di kawasan wisata BKB dan Jembatan Ampera, dalam penyebaran informasi tersebut tetap melibatkan peran dari tim keamanan dan pengelola tempat wisata. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas terhadap informasi dari hasil pengelolaan informasi yang dilakukan oleh PJ Ratu Dewa hingga banyak yang terlibat dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan ini sebagai usaha untuk berlangsung secara efektif.

Peranan yang memiliki hubungan dengan informasi (*informational role*), merupakan sebuah harapan secara kontinu untuk mampu memperoleh informasi mengenai aksi premanisme dengan berbagai sumber dan akan berjalan dengan baik melalui tahapan pertemuan kepada masyarakat sebagai keluhan ataupun dilakukan pada saat observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh Ratu Dewa. Dari adanya informasi yang telah diperoleh sebagai seorang pemimpin Ratu Dewa menjalankan perannya dalam mengelola informasi atau menganalisis masalah yang terjadi dan mencari peluang-peluang untuk melakukan tindak lanjut terhadap aksi premanisme.

Informasi yang telah diperoleh mengenai aksi premanisme baik itu yang bersifat aktual atau yang berhubungan dengan preferensi masyarakat akan mempengaruhi peran pemimpin. Sehingga dengan adanya informasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak lain atau kelompok lain yang memiliki wewenang yang sesuai dengan peraturan daerah dan bagian dari struktur organisasi kepemimpinan PJ Ratu Dewa. Sebagai seorang pemimpin PJ Ratu Dewa telah bertindak dan memosisikan dirinya sebagai bagian dari pusat informasi sehingga dapat menyaring dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata dapat terlaksana.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daswati (2021) dalam jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik mengatakan bahwa peran kepemimpinan merupakan suatu konsep seseorang

dapat mengembangkan suatu posisi atau tempat untuk dapat melaksanakan peranan dengan berbagai informasi dan peraturan yang ada. Peran kepemimpinan merupakan wujud dari sosok pemimpin yang memiliki kredibilitas serta ingteritas yang memadai berperan dalam memberikan pergerakan informasi kepada pengikut dilanjutkan dengan pergerakan-pergerakan untuk mengatasi suatu permasalahan (Daswati , 2021).

Dalam ranah kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan perannya tidak dapat berlaku secara individual melainkan harus melibatkan kelompok lain yang biasa dikenal dengan bawahan dalam kepemimpinan organisasi atau wilayah yang luas. Dalam menjalankan peran dalam mengelola informasi pemimpin membutuhkan peran dari bawahan karena untuk melakukan pekerjaan dengan efisien, efektif, dan produktif. Dalam penelitian ini PJ Wali Kota Palembang melibatkan tim keamanan dan pengelola tempat sebagai bagian dari respon terhadap informasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang terutama di Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera.

3. Peranan yang Memiliki Hubungan Pengambilan Keputusan (*decisional role*)

Peranan pengambilan keputusan sebagai peranan yang sulit dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan program untuk masyarakat. Pengambilan keputusan berkaitan dengan pembuatan strategi yang akan digunakan dalam mengatasi sesuatu (Setiawan, 2017). Dalam pengambilan keputusan pemimpin mengenai ketertiban dan keamanan harus terlibat secara langsung dan hal ini berkaitan dengan fungsi dari pemimpin, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 jo. Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin akan memiliki atau melibatkan intuisi, logika, serta tahapan proses data, informasi atau fakta yang ada untuk dilanjutkan sebagai kerangka dalam perencanaan mengatasi suatu hal. Dalam penelitian keputusan yang ditetapkan oleh PJ Ratu Dewa dalam perencanaan hingga pelaksanaan dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang.

Pengambilan keputusan sebagai salah satu bagian yang bersifat integral dari kepemimpinan. Adanya keputusan sebagai fungsi dari peran pemimpin untuk mencapai tujuan dalam suatu kepemimpinan, tujuan tersebut tidak terlepas dari kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. sebagai bagian dari suatu proses, penyusunan strategi merupakan bagian dari keputusan dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata kota Palembang.

Hasil temuan, adanya strategi untuk mengatasi aksi premanisme merupakan bagian dari peran pengambilan keputusan Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang dengan

merancang mekanisme pendirian dengan mendirikan posko terpadu guna melakukan pengawasan yang dilakukan selama 24 jam atau beroperasi selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat yang melakukan kunjungan wisata. Strategi selanjutnya berkaitan dengan keputusan mengenai sanksi tegas yang diberikan kepada oknum pelaku pelanggaran seperti pemalakan, pemerasan, dan pungli, bahkan penodongan. Pihak Pemkot telah menyiapkan beberapa tempat hingga setelahnya akan dilakukan pembagian personel. Sebagai suatu yang bersifat dinamis pengambilan keputusan yang dalam perencanaan strategi telah melalui berbagai pertimbangan dan memperhatikan seksama yang terlibat.

Penanganan gangguan berkaitan dengan kemampuan peran pemimpin dalam mengambil keputusan, karena hal tersebut akan berhubungan dengan banyak pihak yang terlibat, dengan melibatkan pihak tersebut tentu membutuhkan keputusan dengan berbagai pertimbangan. Penanganan gangguan aksi premanisme sebagai hasil kerja lanjutan dari pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PJ Ratu Dewa yang berkaitan dengan aksi premanisme adalah mengarah pada keamanan kawasan wisata. Seperti halnya yang telah diuraikan pada wawancara di atas adanya aksi premanisme berupa pemalakan yang terjadi memberikan keputusan pemimpin untuk lebih memperhatikan ketertiban wilayah dan ketentraman bagi wisatawan. Dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh PJ Wali Kota dengan tetap memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku di daerah wilayah kekuasaannya.

Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan PJ Ratu Dewa telah melakukan berdasarkan peraturan daerah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam pengambilan keputusan masih berkaitan dengan peraturan yang berlaku, tidak dilakukan hanya berdasarkan pola pikir individual, tetap harus berdasarkan pada peraturan daerah tempat wilayah kekuasaan. Sebagai bagian dari peran yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam mengambil keputusan, bentuk penanganan sebagai hasil dari pemecah aksi premanisme yang harus dilakukan dengan berbagai unsur perencanaan.

Pengambilan keputusan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis mengenai suatu permasalahan, dengan melalui pengumpulan data atau informasi dalam menentukan alternatif yang akan dihadapi untuk dapat mengambil tindakan. Keputusan akan berisi rangkaian dari tindakan dalam melakukan analisis dalam permasalahan. Proses dari analisis tersebut akan berakhir pada sebuah kesimpulan berupa pengambilan keputusan

sebagai bahan pertimbangan. Keputusan sebagai suatu proses akhir dari adanya pemikiran yang digunakan sebagai tujuan pemecah masalah.

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum Herbert Simon telah mengklasifikasikan tipe pengambilan keputusan yang biasanya digunakan oleh pemimpin. Pertama, keputusan yang terprogram, merupakan keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin dengan memperhatikan prosedur, aturan, dan kebiasaan. Keputusan ini akan berlangsung secara terus menerus atau berulang-ulang (Kusnadi, 2015). Setiap organisasi pemerintahan termasuk Pemkot telah memiliki berbagai kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan mempermudah pemimpin dalam mengambil keputusan untuk situasi yang terjadi, seperti dalam penelitian ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PJ Walikota untuk menangani aksi premanisme. Kedua, keputusan tidak terprogram yang merupakan keputusan yang tidak tersusun, keputusan ini masih membutuhkan penanganan khusus baik itu mengarah pada pengalaman atau intuisi dari sosok pemimpin yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.

Sedangkan dari aspek ruang lingkup kepemimpinan, pengambilan keputusan ini telah terbagi menjadi dua seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu keputusan strategi dan keputusan operasional. Keputusan strategi dapat berlaku jangka panjang, sebagai perencanaan yang dilakukan dengan skala besar, yang berarti dalam perencanaan harus dilakukan dengan dasar tujuan masa depan. Keputusan strategi pada penelitian ini mengarah pada strategi yang ditetapkan oleh Ratu Dewa untuk mengatasi aksi premanisme yaitu dengan strategi pendirian posko keamanan di beberapa titik, pemberlakuan sanksi pada pelaku aksi premanisme terutama pada aksi tindak pidana yang menggunakan senjata tajam, dan strategi pembinaan personel tim keamanan. Sedangkan, keputusan operasional merupakan bentuk implementasi dari keputusan strategi, pada penelitian ini pengambilan keputusan operasional berupa keputusan penetapan dengan melibatkan kinerja dari pihak keamanan yaitu pihak kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada pertimbangan dan peraturan yang berlaku, dan mengacu pada informasi yang relevan. Selain itu, keputusan yang diambil harus dapat mempertimbangkan dampak yang terjadi yang diharapkan menjadi dampak positif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Smedes (1995) yang mengatakan bahwa dalam menganalisis informasi sampai pada tahap pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Dampak yang terjadi dengan adanya

keputusan yang diambil oleh PJ Ratu Dewa adalah berdampak positif yaitu berkurangnya aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang terutama BKB dan Jembatan Ampera.

Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran dalam pelaksanaan tugasnya yang dikenal dengan peran kepemimpinan, berdasarkan pada teori peran dari Mintzberg, peran antar pribadi yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Palembang Ratu dewa dalam mengatasi aksi premanisme di kawasan wisata adalah dengan menunjukkan sikap kepemimpinan yang dimiliki yang mengarah pada kemampuannya untuk dapat memimpin bawahan dan melibatkan bawahan dalam mengatasi hal tersebut. Dengan adanya hal ini, telah menunjukkan sebuah gambaran bahwa peran pribadi yang dilakukan oleh Ratu Dewa sebagai seorang pemimpin telah terbentuk dengan melibatkan kinerja dari bawahannya dengan cara mengarahkan, memotivasi, dan melakukan kontrol secara langsung.

Dalam peran terdapat sebuah perilaku yang berasal dari individu untuk melakukan peran, dalam penelitian ini adalah peran dari PJ Walikota Palembang Ratu Dewa, peran tersebut berisikan perilaku aktual berupa kesadaran Ratu Dewa sebagai PJ Walikota Palembang untuk dapat melakukan tindakan atau perilaku yang sesuai dengan fungsi kewenangannya sebagai pemimpin, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai sajian peran yang bersifat dramatis berupa adanya tindakan premanisme di kawasan wisata Kota Palembang Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera. Sehingga, peran yang terlihat berupa perilaku atau tindakan dari Ratu Dewa untuk menangani premanisme di kawasan tersebut dengan beberapa peran yang dapat terlihat antara lain peran antar pribadi, peranan informasi, dan peranan pengambilan keputusan.

Dengan adanya peran-peran yang dilakukan oleh Ratu Dewa sebagai walikota, berdasarkan pengakuan dari masyarakat sekitar terutama pedagang tingkat kunjungan wisatawan di Benteng Kuto Besak dan Ampera mulai kembali meningkat karena tingkat keamanan yang membaik dan kejelasan tarif parkir yang ditetapkan oleh keputusan walikota.

Dari hasil wawancara tersebut, keadaan BKB dan Ampera kembali ramai dikunjungi oleh wisatawan dan pedagang mulai aktif kembali, hal ini merupakan hasil dari peran antar pribadi PJ Ratu Dewa dengan adanya arahan yang jelas kepada bawahan untuk menciptakan keamanan di kawasan Benteng Kuto Besak dan Ampera, hal ini telah terbukti dengan kemampuan para aparat keamanan untuk menjaga ketentraman wilayah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Ratu Dewa, meskipun hal ini terjadi secara bertahap namun untuk pemalakan yang dilakukan oleh oknum juru parkir dan pengamen mulai berkurang karena adanya penjagaan selama 24 jam oleh tim keamanan. Selain itu, dari peran berkaitan

dengan informasi dengan kemampuan Ratu Dewa dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi mengenai aksi premanisme tersebut, sehingga aksi ini dapat diatasi dengan peran pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mengambil keputusan mengenai strategi dan implementasi operasional.

Peran antar pribadi (*interpersonal role*) dalam peran kepemimpinan harus melihat tindakan dari pemimpin dalam berbagai situasi atau keadaan yang akan menjadi penghubung antara pihak satu dengan pihak yang lain dalam mengatasi permasalahan. Peran antar pribadi dari kepemimpinan dapat diukur berdasarkan indikator perannya sebagai pemimpin merujuk pada sikap, ketegasan, dan karakteristik, serta indikator peran pejabat perantara yang mengarah pada kemampuan pemimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan.

Peranan yang memiliki hubungan dengan informasi (*informational role*), sebagai peran kepemimpinan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang bersifat interpersonal yang berarti pemimpin sebagai seorang atasan meletakkan posisinya untuk dapat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada semua kalangan mulai dari bawahan hingga ke masyarakat luas. Dalam mengumpulkan informasi Ratu Dewa menerima secara langsung aduan dari masyarakat dan menerima melalui sosial media, kemudian setelah menerima informasi mengenai adanya aksi premanisme di kawasan wisata tersebut Ratu Dewa melakukan observasi langsung ke lokasi yang didampingi dengan tim keamanan. Ratu Dewa telah berperan sebagai pemantau dalam menjalankan perannya yang berhubungan dengan informasi yang mampu melakukan identifikasi kepada seorang individu untuk menjadi pemimpin yang mampu mengumpulkan informasi dan menerima informasi mengenai aksi premanisme.

Informasi yang diterima oleh Ratu Dewa sebagai PJ Wali Kota Palembang merupakan informasi yang berasal dari luar organisasi atau *external events* yaitu informasi yang berasal dari luar organisasi kepemimpinan yaitu keresahan masyarakat atau wisatawan mengenai salah satu lokasi di wilayah pimpinannya yaitu Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera sebagai destinasi wisata atau tempat yang memiliki nilai jual kepada wisatawan. Kemudian, dalam menjalankan perannya yang berhubungan dengan informasi Ratu Dewa telah mampu mengolah dan menganalisis informasi tersebut yang berasal dari laporan masyarakat hingga dilakukan penyebaran untuk mewaspadaai aksi tersebut kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan informasi memiliki kecenderungan oleh seorang pemimpin untuk membutuhkan tempat sebagai sasaran untuk dapat mengembangkan atau mengatasi informasi

yang telah diterima dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membantu mengatasi hal tersebut. Adanya sebuah tekanan seorang pemimpin harus menerima informasi yang memberikan akibat besar dalam wilayah pimpinannya seperti yang terjadi di kawasan wisata BKB dan Jembatan Ampera yang mendapat respon negatif dari masyarakat luar atau wisatawan karena ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh banyaknya pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

Peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), sebagai bagian dari peran kepemimpinan PJ Walikota Palembang Ratu dewa telah mampu melaksanakan perannya dalam pengambilan keputusan mengenai aksi premanisme dengan cara mengambil keputusan mengenai strategi dan implementasi operasional. Perencanaan strategi yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak keamanan untuk mendirikan posko di beberapa titik lokasi wisata untuk memaksimalkan pengawasan terhadap aksi premanisme, strategi dilanjutkan dengan penyebaran tim keamanan yang beroperasi selama 24 jam dengan pergantian sif dari tim keamanan.

Kemudian untuk pengambilan keputusan dalam penanganan Ratu Dewa secara langsung melibatkan pihak kepolisian, TNI, dan Satpol PP dan telah keputusan untuk melakukan hal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Dengan hal ini menunjukkan bahwa peran pemimpin dalam pengambilan keputusan masih berkaitan dengan pertauran yang berlaku, tidak dilakukan hanya berdasarkan pola pikir individual, tetap harus berdasarkan pada peraturan daerah tempat wilayah kekuasaan. Sebagai bagian dari peran yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam mengambil keputusan, bentuk penanganan sebagai hasil dari mengatasi aksi premanisme yang harus dilakukan dengan berbagai unsur perencanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kepemimpinan PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa terhadap aksi premanisme di kawasan wisata Kota Palembang yang dianalisis dengan menggunakan teori peran menurut Mintzberg, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa PJ Walikota telah memenuhi peran kepemimpinan yaitu: Pertama peran antar pribadi (*interpersonal role*) sebagai pemimpin mampu mengarahkan tim keamanan memberikan arahan kepada Danru, Kasi, Kabid dengan memberikan arahan dengan setiap personil untuk bimbingan dari pusat untuk menjaga keamanan. Kedua, hubungan dengan informasi (*informational role*) secara terbuka memperoleh informasi dari keluhan masyarakat lokal

M. Sutarman, Taufik Akhyar, Deany Afriany, Peran Kepemimpinan PJ Walikota Ratu Dewa terhadap Premanisme di Kawasan Wisata Kota Palembang, JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.1, April 30, 2025

maupun wisatawan, dengan adanya keluhan tersebut sebagai seorang pemimpin pernah secara langsung meninjau lokasi Benteng Kuto Besak sebagai salah satu wilayah dengan aksi premanisme. Ketiga, peranan pengambilan keputusan (*decisional role*), Wali Kota Palembang dengan merancang mekanisme pendirian dengan mendirikan posko terpadu guna melakukan pengawasan yang dilakukan selama 24 jam atau beroperasi selama 24 jam.

REKOMENDASI

Dari hasil penelitian di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain: Pertama, untuk pemimpin untuk menyadari akan peran kepemimpinan terutama dalam mengatasi aksi premanisme. Kedua, untuk peneliti selanjutnya, lebih baik dalam melakukan pengumpulan data terutama mengenai peran antar pribadi pemimpin dan melihat lebih dalam hubungan antara pemimpin dengan bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daswati. (2024). Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi.. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4 (1)
- Milles, Matthew. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mustamant, Mugi. (2013). *Kamus Sosiologi*. Bandung: CV. Titian Ilmu.
- Raharjo, Budhi S. (2012). *Anton Medan: Aku Bukan Penjahat*. Jakarta: Anton Medan Center.
- Setiawan, Andri. (20017). “Analisis Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Komitmen Organisasional Karyawan (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang, Kawi).” *Jurnal Administrasi Bisnis* 50(6).
- Siregar, H. Coy. (2024). “Mengapa Preman Palembang Lihat Wisatawan Seperti Mangsa?” *Radartv.Disway.Com*.
- Sugiyono. (2018). *Metde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, Toby Samuel. (2024). Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Margasatwa Ragunan. *Indonesian Journal of LAW and Justice* 1(4).
- Trioctavia, Jayanti, dkk. (2016). Peranan Pemimpin dalam Mengembangkan Budaya Organisasi (Studi Kaus Pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Malang Regonal Office. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAD)* 40(1).

EVALUASI TATA KELOLA KPU DAN BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PILKADA 2024 : KABUPATEN PASAMAN, SUMATERA BARAT

Rafif Luqmanul Aziz¹, Tio Alfarizi², Raissa Kevin Ivansyach³ Lia Wulandari⁴

Program Studi Ilmu Politik FISIP UPNVJ¹²³⁴

E-mail : 2310413137@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the governance of the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Board (Bawaslu) in conducting the re-voting (PSU) during the 2024 Simultaneous Regional Elections in Pasaman Regency, West Sumatera. PSU serves as a democratic instrument provided within the electoral legal framework to address various violations or irregularities in the voting process. The study adopts a qualitative approach using a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and analysis of relevant official documents. The findings reveal that the implementation of PSU in Garut faced several challenges, including limited execution time, uneven logistics, and low voter participation. KPU Pasaman demonstrated professionalism in preparing the PSU stages but encountered difficulties in cross-sector coordination and disseminating information to the public. Meanwhile, Bawaslu pasaman performed well in terms of supervision and handling violations but was less optimal in preventive measures and voter education. Local political dynamics also influenced the effectiveness of the two institutions. This study recommends strengthening the institutional capacity of KPU and Bawaslu through technical training, the development of more adaptive standard operating procedures, and enhanced collaboration with local stakeholders. These findings are expected to serve as a reference for improving electoral governance, particularly in PSU implementation in regions with high election vulnerability.

Keywords: Re-voting, General Elections Commission (KPU), Election Supervisory Board (Bawaslu), 2024 Regional Elections, Electoral Governance, Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. PSU merupakan instrumen demokratis yang disediakan dalam kerangka hukum pemilu untuk mengoreksi berbagai pelanggaran atau kejanggalan dalam proses pemungutan suara. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen mendalam dan analisis dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU di Pasaman menghadapi berbagai tantangan, seperti kesalahan administrasi pendaftaran calon, keterbatasan waktu pelaksanaan, logistik yang tidak merata, konflik antar pendukung, politisasi PSU, serta rendahnya partisipasi pemilih. KPU Pasaman dinilai cukup profesional dalam menyiapkan tahapan PSU, namun masih menemui kendala dalam hal koordinasi lintas sektor dan distribusi informasi kepada publik. Sementara itu, Bawaslu Pasaman menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal pengawasan dan penindakan pelanggaran, namun belum optimal dalam aspek pencegahan dan pendidikan pemilih. Terdapat pula dinamika politik lokal yang turut mempengaruhi efektivitas kerja kedua lembaga tersebut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu melalui pelatihan teknis, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan tata kelola pemilu, khususnya pada pelaksanaan PSU di daerah dengan tingkat kerentanan pemilu yang tinggi.

Kata kunci: Pemungutan Suara Ulang, KPU, Bawaslu, Pilkada 2024, Tata Kelola Pemilu, Pasaman

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang bertujuan untuk menjamin perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, Pilkada di berbagai daerah tidak selalu berjalan mulus. Pelanggaran administratif, pelanggaran etik, hingga tindak pidana pemilu seringkali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa hasil dan bahkan mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang mengalami PSU karena ditemukannya pelanggaran prosedural yang signifikan, khususnya terkait distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, serta indikasi pelanggaran prinsip-prinsip dasar pemilu yang mengharuskan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Evaluasi terhadap tata kelola KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas institusi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pembenahan sistemik terhadap mekanisme pemilu di tingkat lokal. Tata kelola pemilu yang baik menuntut adanya transparansi, integritas, profesionalitas, serta koordinasi yang solid antar lembaga penyelenggara pemilu dalam seluruh tahapan pelaksanaan PSU. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menekankan pentingnya akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam setiap proses kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Pada konteks Kabupaten Pasaman, peran KPU sebagai penyelenggara teknis utama dan Bawaslu sebagai pengawas independen diuji ketika pelaksanaan PSU harus dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan dengan tekanan publik yang tinggi.

Lebih jauh, pelaksanaan PSU di Pasaman tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan keterbatasan sumber daya yang menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Selain itu, masih ditemukannya praktik-praktik manipulatif seperti mobilisasi pemilih, penggelembungan suara, dan pelanggaran terhadap asas netralitas penyelenggara pemilu menunjukkan adanya masalah struktural dalam tata kelola pemilu di tingkat daerah¹. Dalam konteks ini, studi evaluatif terhadap pelaksanaan PSU Pilkada 2024 di Pasaman menjadi signifikan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran dan efektivitas KPU dan

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025*

Bawaslu dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis dan bermartabat. Evaluasi ini juga menjadi penting dalam memberikan rekomendasi perbaikan ke depan agar proses PSU tidak menjadi mekanisme normatif belaka, tetapi benar-benar menjadi ruang perbaikan kualitas demokrasi lokal.

Secara normatif, penyelenggaraan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu. Namun demikian, persoalan implementatif seringkali menjadi sumber kegagalan. Dalam hal ini, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek hukum-formal, melainkan juga pada kapasitas kelembagaan, kemampuan manajerial, serta koordinasi antar-aktor pemilu di tingkat daerah. Studi kasus Kabupaten Pasaman memberikan ruang empirik untuk menelusuri lebih dalam bagaimana KPU dan Bawaslu menanggapi situasi krisis, mengambil keputusan strategis, serta menyesuaikan mekanisme teknis PSU agar sesuai dengan ketentuan hukum dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif tata kelola KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pasca-PSU, dengan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan berbasis studi lapangan.

Lebih jauh lagi, penelitian ini akan berkontribusi terhadap wacana akademik mengenai tata kelola pemilu di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan konflik elektoral melalui PSU. Selain itu, hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi para pembuat kebijakan, lembaga penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan langkah-langkah pembenahan kelembagaan dan sistemik demi menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi tata kelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai proses, kendala, serta efektivitas peran kedua lembaga tersebut dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dengan waktu pelaksanaan 19 April 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Diperoleh dari dokumen resmi seperti keputusan, laporan, berita acara, serta regulasi

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025*

yang relevan, termasuk berita dari media massa yang mengulas proses PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik dari sisi sumber maupun metode, guna memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat secara umum telah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa tantangan di lapangan. Dari aspek perencanaan, KPU Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat telah melakukan persiapan secara sistematis, termasuk pengaturan anggaran, pendistribusian logistik, dan sosialisasi kepada pemilih. Namun, keterbatasan waktu menjadi hambatan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, yang berdampak pada distribusi logistik. Meski begitu, jajaran penyelenggara di tingkat bawah mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut melalui koordinasi dengan pihak lokal. Dalam hal koordinasi kelembagaan, KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menunjukkan hubungan kerja yang sinergis, terutama dalam pengawasan teknis serta pelaporan pelanggaran selama proses PSU berlangsung. Meski komunikasi berjalan baik di tingkat pusat dan kabupaten, ditemukan adanya miskomunikasi di lapangan akibat beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah petugas.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pasaman pada Pilkada 2024 adalah 605 TPS pada tanggal 19 April 2024. Namun, setelah PSU tersebut, ada satu TPS lagi, yaitu TPS 02 Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, yang harus menggelar PSU ulang lagi pada tanggal 22 April 2025 karena adanya dugaan pelanggaran dalam PSU sebelumnya. Jadi, total TPS yang melakukan PSU awalnya adalah 605 TPS, dengan tambahan satu TPS yang menggelar PSU lanjutan.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan dilaksanakannya PSU di ini mencakup pelanggaran administratif, prosedural, kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta adanya kecurangan yang merusak integritas hasil pemilu. Salah satunya adanya calon Wakil Bupati Pasaman nomor urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, diketahui pernah dihukum 2 bulan 24 hari penjara dalam kasus penipuan. Namun, dalam proses pencalonannya, Anggit tidak mengungkapkan statusnya sebagai

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025*

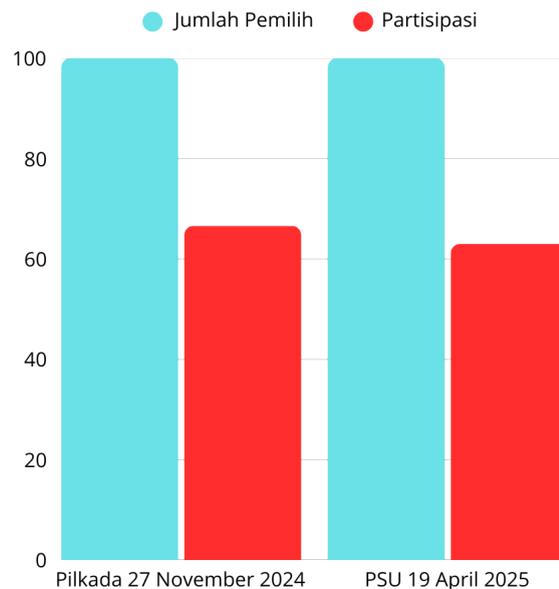
mantan terpidana kepada publik, yang merupakan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Mahkamah Konstitusi (MK) menilai tindakan tersebut sebagai ketidakjujuran dan mendiskualifikasi Anggit dari pencalonan Wakil Bupati Pasaman. MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan PSU tanpa memasukkan Anggit sebagai calon Wakil Bupati, dan memberi kesempatan kepada partai pengusung untuk mengganti Anggit dalam waktu 60 hari setelah putusan dibacakan. masalah lainnya yang memicu PSU adalah adanya kesalahan dalam penyusunan DPT, di mana beberapa pemilih yang seharusnya terdaftar tidak tercatat, sementara sebaliknya, terdapat nama pemilih yang tidak berhak memilih namun terdaftar dalam DPT. Kesalahan ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hasil pemilu yang pertama, memicu keputusan untuk melakukan PSU sebagai upaya untuk memastikan bahwa hanya pemilih yang sah yang dapat berpartisipasi.

Selain itu, kecurangan yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara, seperti pemilih ganda dan penyalahgunaan surat suara, turut memperburuk integritas hasil pemilu. Temuan terkait pelanggaran ini, meskipun terbatas pada sejumlah TPS, memunculkan keraguan yang meluas di kalangan masyarakat dan peserta pemilu, sehingga Bawaslu dan KPU setempat memutuskan untuk menyelenggarakan PSU guna menghindari ketidakadilan. Gangguan keamanan yang terjadi di beberapa wilayah juga berkontribusi pada terhambatnya proses pemungutan suara, mengakibatkan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan dengan penuh integritas. Oleh karena itu, PSU dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses demokrasi.

Faktor lainnya yang turut menyebabkan PSU adalah kesalahan logistik, seperti keterlambatan distribusi surat suara dan peralatan pemilu yang mengakibatkan kekurangan surat suara pada beberapa TPS. Selain itu, ketidaktepatan informasi yang disampaikan kepada pemilih mengenai waktu dan tempat PSU juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipasi pada pemungutan suara pertama, memaksa penyelenggaraan ulang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kehadiran pemilih. Secara keseluruhan, pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman merupakan respons terhadap berbagai masalah yang muncul dalam pemungutan suara pertama, baik yang bersifat teknis, prosedural, maupun sosial, dengan tujuan untuk memulihkan integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada 2024.

Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman diikuti menjadi 2 pasangan calon, yakni paslon nomor urut 2 Mara Ondak-Desrizal, dan paslon nomor urut 3 Sabar AS-Sukardi. Namun partisipasi masyarakat dalam PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengalami penurunan

dibandingkan dengan pemungutan suara sebelumnya. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, tingkat partisipasi pemilih pada PSU yang diselenggarakan pada 19 April 2025 tercatat mencapai 63 persen, turun sebanyak 3,6% dari pemilihan sebelumnya yang serentak pada 27 November 2024.



Sumber: merdeka.com

Partisipasi masyarakat dalam PSU mengalami penurunan dibandingkan pemungutan suara sebelumnya. Berdasarkan berita informasi dari warga, penurunan ini disebabkan oleh kejenuhan politik, informasi yang kurang tersampaikan secara menyeluruh, serta keraguan masyarakat terhadap efektivitas PSU. Meski demikian, sebagian masyarakat tetap menilai PSU sebagai langkah korektif yang penting untuk menjamin keadilan pemilu. Di sisi pengawasan, Tidak ditemukan pelanggaran berat yang berpotensi menggagalkan hasil PSU. Tindak lanjut yang cepat oleh KPU terhadap rekomendasi Bawaslu menjadi indikator bahwa sistem pengawasan berjalan cukup efektif. Terakhir, baik KPU maupun Bawaslu menilai bahwa PSU ini menjadi momentum pembelajaran penting dalam memperkuat kesiapan teknis, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperbaiki sistem pelaporan serta pengawasan ke depan, termasuk potensi digitalisasi proses pemilu sebagai inovasi tata kelola yang lebih baik.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penting adanya keterlibatan sosialisasi intensif dan terstruktur untuk menopang penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Bangun kembali antusiasme pemilih Hindari kesan "pemilu yang diulang-ulang" dengan menyampaikan bahwa PSU adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki demokrasi dan menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif dan emosional, seperti video testimoni warga atau kampanye digital dengan narasi personal. Aktifkan keterlibatan generasi muda seperti mahasiswa, komunitas lokal, dan pelajar sebagai agen. Penting bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Pasaman membangun sistem elektronik yang lebih efisien bagi media informasi maupun media pelaporan.

Adanya pelatihan yang rutin guna persiapan PSU, untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan pelanggaran administratif yang sering kali luput dari perhatian. KPU dan Bawaslu harus senantiasa membuka ruang informasi yang lebih transparan guna menunjang pelaksanaan PSU mengenai hasil pengawasan, dan pelanggaran administratif yang ditemukan dan langkah-langkah yang telah dilakukan, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu ulang. Terakhir membangun konesi dan kordinasi yang baik dengan KPU dan BAWASLU tingkat provinsi maupun nasional guna meminimalisir kejadian pelemahan administrasi serta logistik.

Gambar 1. Rapat Pleno Membacakan Hasil Rekapitulasi



Sumber: <https://www.instagram.com/kpukabupatenpasaman>

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis. KPU Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dinilai cukup profesional dalam merancang dan melaksanakan tahapan PSU,

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025*

meskipun masih dihadapkan pada tantangan waktu yang terbatas, distribusi logistik yang tidak merata, serta partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat berhasil menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran secara aktif, namun kurang maksimal dalam aspek pencegahan dan pendidikan pemilih.

Hubungan kerja antara KPU dan Bawaslu menunjukkan sinergi yang baik, khususnya dalam pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta beban kerja yang tinggi mengakibatkan adanya miskomunikasi di tingkat lapangan. Dinamika politik lokal dan kepercayaan publik yang fluktuatif turut menjadi variabel penting yang mempengaruhi efektivitas tata kelola kedua lembaga.

PSU di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat memberikan pembelajaran penting bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek prosedural, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas koordinasi antar-aktor, serta keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pelatihan teknis, penyusunan SOP yang adaptif, peningkatan literasi pemilih, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam proses pemilu. Temuan ini diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemilu ke depan, terutama di daerah dengan tingkat kerentanan elektoral yang tinggi, agar tercipta pemilu yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilnah, S., & Roilkan. (2019). *Pelngatar motodel pelnelliltilan kualiltatiltf illmu poliltilk* (wanda). Prelnadameldila Group
- Anjanil, A. (2019). *Akun Instagram @pilntelrpoliltilk Selbagai Platform Lilntelrasil dilgital* (studil Delskriptiltf Kualiltatiltf pada pilntelrpoliltilk.com).Skrilpsil
- Bogdan, Robelrt C. And Taylors K.B. 1992. (*Qualiltatiltvel RelselartchFor Elducation An Hadiz,* Vedi R. (2017). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Sulaiman, A. (2020). "Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas: Evaluasi terhadap Kinerja KPU dan Bawaslu." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 11, No. 2, hlm. 143-159.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2004). *Governance Indicators: A User's Guide*. New York: UNDP.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- López-Pintor, R. (2000). *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*. New York: UNDP.

Rafif Luqmanul Aziz, Tio Alfarizi, Raissa Kevin Ivansyach, Lia Wulandari, Evaluasi Tata Kelola KPU dan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024: Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, *JSIPOL*, Vol. 4 Issue. 2 No.2, April 30, 2025

Introduction To The Theory And Methods. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, April 10). *MK Perintahkan PSU di Salah Satu TPS Pilkada Pasaman*. MKRI.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22966>

Radar Lampung. (2024, April 12). *Satu TPS di Pasaman, Sumatera Barat Wajib Ulang PSU*.

<https://radarlampung.bacakorana.co/read/21013/satu-tps-di-pasaman-sumatera-barat-wajib-ulang-psu>

Media Indonesia. (2024, April 14). *Kuras Anggaran Negara, Legislator Harap Tak Ada PSU Lagi di Pilkada Pasaman*.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/762131/kuras-anggaran-negara-legislator-harap-tak-ada-psu-lagi-di-pilkada-pasaman>

Antara News. (2024, April 13). *Terjadi Pelanggaran, Satu TPS pada PSU Pilkada Pasaman Harus Diulang*.

<https://www.antarane.ws.com/berita/4783937/terjadi-pelanggaran-satu-tps-pada-psu-pilkada-pasaman-harus-diulang>

DetikNews. (2024, April 15). *Terungkap di MK, Cawabup Pasaman Dapat Surat Bebas Pidana Meski Pernah Dibui*.

<https://news.detik.com/pilkada/d-7773235/terungkap-di-mk-cawabup-pasaman-dapat-surat-bebas-pidana-meski-pernah-dibui>

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024, April 17). *Rilis: KPU, PSU di 8 Kabupaten/Kota Berjalan Tertib dan Lancar*.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12861/rilis-kpu-psu-di-8-kabupatenkota-berjalan-tertib-dan-lancar>

Antara Sumbar. (2024, April 18). *KPU: Rekapitulasi Suara PSU Pilkada Pasaman Selesai di 11 Kecamatan*.

<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/674329/kpu-rekapitulasi-suara-psu-pilkada-pasaman-selesai-di-11-kecamatan>

MOTIF POLITIK ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN

Adhari Febriansyah¹, Afif Musthofa Kawwami, M.Sos²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²

E-mail : afebriansyah0222@gmail.com

ABSTRACT

One example of a prolonged conflict in the region is the conflict between Saudi Arabia and Yemen, which has also influenced the geopolitical dynamics of the Middle East. The conflict in Yemen began with a political dispute between the government of Ali Abdullah Saleh and his supporters with the rebels who later collaborated with the Houthi group. The aim is to understand the political motives in the conflict between Saudi Arabia and Yemen. This research method is a type of library research, which is based on the study and review of texts with primary data sourced from the book *Saudi Interventions in Yemen, A Historical Comparison of Ontological Insecurity-Routledge*, which is used to discuss the political motives of Saudi Arabia in the Yemen conflict. This study discusses three main motives that drive involvement in this conflict, namely 1) Material Incentive Motive, 2) Solidarity Incentive Motive, 3) Idealism Incentive Motive. Material Incentive Motive, In this case, there are two factors that influence the material incentive motive, namely seizing control of oil and expanding the Gulf region. Solidarity Incentive Motive, Yemen is the worst humanitarian disaster in the world. The biggest response in the world. On the brink of famine for the past four years. The country is neglected, severely underfunded, and extremely dangerous. Motive Incentive Idealism, Yemen's brutal civil war has raged for nearly a decade, creating one of the greatest humanitarian tragedies of modern times. Although religion is not the primary driver of the conflict in Yemen, the major groups involved in the fighting do differ in terms of religious identity, Ethnic and religious differences in Yemen which consists of several different ethnic and religious groups, including Sunni and Shia.

Keywords: Political Motives, Conflict, Saudi Arabia, Yemen

ABSTRAK

Salah satu contoh konflik yang berkepanjangan di kawasan ini adalah konflik antara Arab Saudi dan Yaman, yang turut mempengaruhi dinamika geopolitik Timur Tengah. Konflik di Yaman bermula dari pertikaian politik antara pemerintahan Ali Abdullah Saleh dan para pendukungnya dengan pemberontak yang kemudian bekerja sama dengan kelompok Houthi. Tujuannya adalah untuk memahami motif politik dalam konflik antara Arab Saudi dan Yaman. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks dengan Data primer yang bersumber dalam buku *Saudi Interventions in Yemen_A Historical Comparison of Ontological Insecurity-Routledge*, yang digunakan untuk membahas tentang motif politik Arab Saudi dalam konflik Yaman. Penelitian ini membahas tiga motif utama yang mendorong keterlibatan dalam konflik ini yaitu 1)Motif Insentif Material, 2)Motif Insentif Solidaritas, 3)Motif Insentif Idealisme. Motif Insentif Material, Dalam hal ini, ada dua faktor yang mempengaruhi motif insentif material yaitu merebut menguasai minyak bumi dan memperluas kawasan teluk. Motif Insentif Solidaritas, Yaman adalah bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Respons terbesar di dunia. Di ambang kelaparan selama empat tahun terakhir. Negara ini terabaikan, sangat kekurangan dana, dan sangat berbahaya. Motif Insentif Idealisme, Perang saudara yang brutal di Yaman telah berkecamuk selama hampir satu dekade, menciptakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di zaman modern. Meskipun agama bukanlah pendorong utama konflik di Yaman, kelompok-kelompok besar yang terlibat dalam pertempuran tersebut memang berbeda dalam hal identitas agama, Perbedaan etnis dan agama di Yaman yang terdiri dari beberapa kelompok etnis dan agama yang berbeda, termasuk Sunni dan Syiah.

Keywords: Motif Politik, Konflik, Arab Saudi, Yaman

PENDAHULUAN

Geopolitik Timur Tengah kerap dikaitkan dengan konflik yang ada di wilayah tersebut. Berbagai isu antarnegara yang melibatkan aspek keamanan, ekonomi, politik, dan ideologi sering menjadi penyebab pertikaian. Salah satu contoh konflik yang berkepanjangan di kawasan ini adalah konflik antara Arab Saudi dan Yaman, yang turut mempengaruhi dinamika geopolitik Timur Tengah. (Putra, 2018).

Pada tanggal 26 Maret 2015, menteri pertahanan Saudi yang baru, Pangeran Muhammad bin Salman, memulai perang skala penuh pertama kerajaan tersebut sejak tahun 1934 dengan meluncurkan intervensi ke Yaman. Dua tahun kemudian pangeran yang sama menggantikan sepupunya sebagai pewaris takhta, dalam krisis suksesi besar pertama sejak tahun 1964. Kedua langkah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu hal tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan anggota senior keluarga kerajaan yang berkuasa. Meskipun Arab Saudi telah melakukan campur tangan politik dan militer di Yaman selama beberapa dekade, intervensi pada tahun 2015 menandai terobosan besar dalam sejarah kebijakan luar negerinya yang bersifat hati-hati, ditandai dengan intervensi tidak langsung melalui diplomasi dan ketergantungan pada Inggris dan AS untuk perlindungan militer eksternal. (Caroline.F.Tynan, 2020).

Konflik di Yaman bermula dari pertikaian politik antara pemerintahan Ali Abdullah Saleh dan para pendukungnya dengan pemberontak yang kemudian bekerja sama dengan kelompok Houthi. Setelah meningkatnya protes dan pemberontakan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap pemerintahan Ali Abdullah Saleh yang dianggap otoriter dan tidak demokratis, Saleh akhirnya memutuskan untuk mundur dan digantikan oleh Abdu Rabbuh Mansur Hadi sebagai presiden baru pada November 2011. Namun, pergantian kekuasaan dari Saleh ke Hadi tidak menghentikan konflik politik yang terus terjadi di masyarakat Yaman. Ketegangan politik ini berlanjut dan semakin meningkat, menyebabkan ketidakstabilan keamanan di wilayah Yaman.

Konflik saat ini di Yaman merupakan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Berawal dari gelombang Arab Springs pada akhir 2010, Yaman terjebak dalam pusaran konflik. Seiring Seiring berjalannya waktu, konflik ini berubah menjadi perang saudara semakin besar dan memakan banyak korban. Pada 21 September 2014, ibukota Yaman, Sanaa, jatuh ke tangan pemberontak Al Houthi. Setelah beberapa pekan disandera sebagai tahanan rumah oleh pemberontak Houthi, Presiden Abdu Rabbu Mansour Hadi melarikan diri ke Aden dan mengumumkan bahwa ibukota Yaman dipindahkan dari Sanaa ke Aden. (Putra et al., 2019).

Pengangkatan Abd Rabbo Mansour Hadi sebagai Presiden Yaman juga ditolak oleh sebagian masyarakat Yaman. Banyak yang menganggap Abd Rabbo Mansour Hadi sebagai perpanjangan tangan Ali Abdullah Saleh. Kelompok Syiah Houthi memanfaatkan ketidakstabilan politik di Yaman disebabkan oleh upaya penggulingan Ali Abdullah Saleh untuk merebut kekuasaan dari pemerintah. (Nirwasita dan Latupella, 2024).

Serangan yang dilakukan Arab Saudi pada 26 Maret 2015. (O'Connor, 2016) Meskipun disetujui oleh negara-negara anggota Liga Arab sebagai solusi untuk ketidakstabilan di Yaman, langkah tersebut ternyata tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif. Sebaliknya, hal ini justru menimbulkan masalah baru. Ketegangan di Yaman semakin meningkat, mengubah konflik internal yang awalnya terkait politik menjadi perang proksi antara Yaman dan Arab Saudi. Arab Saudi menuduh Iran mendukung kelompok Houthi yang bersekutu dengan oposisi pemerintah,

sehingga memperburuk kondisi di Yaman dan merusak hubungan bilateral antara Yaman dan Arab Saudi. Ketegangan antara kedua negara semakin memanas. (Sari, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dimana teks dipelajari dan diteliti. Hal ini dilakukan karena data yang digunakan berasal dari literatur. Penelitian kepustakaan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Karena penelitian ini berkaitan dengan subjek tersebut, data-data ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, karena kajian berkaitan dengan motif politik Arab Saudi dalam konflik Yaman. Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kajian dari beberapa sumber buku mengenai konflik Timur Tengah sebagai penelitian kepustakaan. (Sapitri, 2017).

Dari uraian yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa studi literatur (*library research*) merupakan rangkaian proses yang mencakup proses pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, proses membaca, pencatatan, serta pengolahan materi yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan sebagai dasar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif politik Arab Saudi dalam keterlibatannya dalam konflik di Yaman.

HASIL DAN DISKUSI

Motif Insentif Material

Dalam konteks ini, terdapat dua faktor yang berpengaruh motif insentif material yaitu merebut menguasai minyak bumi dan memperluas kawasan teluk, sebagai berikut:

1. Menguasai Kekuasaan Minyak Bumi

Minyak bumi atau minyak mineral diperoleh dari perut bumi dan kandungannya berupa senyawa hidrokarbon. Minyak bumi setelah diproses yang biasanya dari cara penyulingan bertingkat diperoleh produk seperti bensin, minyak tanah, solar, avtur, dan sebagainya. (Sastrohamidjojo, 2021).

Arab Saudi tidak secara langsung menguasai sumber daya minyak di Yaman, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dalam konflik Yaman, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya negara tersebut, termasuk minyak. Konflik Yaman yang dimulai pada tahun 2014 melibatkan banyak aktor, termasuk kelompok Houthi yang didukung Iran dan koalisi yang dipimpin Arab Saudi.

Sejak Maret 2015, ketika terjadi perang saudara yang juga diganggu oleh Arab Saudi, negara terbesar kedua di Jazirah Arab ini terus menerus diserang oleh Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Alibinya adalah konflik dua aliran besar Islam, Sunni dan Syiah.

Padahal, menurut penelitian mendalam pengamat politik AS Phil Butler, rahasia Saudi yang terus membombardir Yaman tak lain adalah “kehausannya” akan cadangan minyak dan gas alam. Saudi ingin terus memegang kendali akan cadangan minyak dan gas Yaman juga lantaran cadangan minyaknya, berpotensi akan habis dalam beberapa waktu ke depan. (Wirayudha, 2016).

Yaman sangat bergantung pada sumber daya minyak bumi, yang menyumbang hampir 25% PDB dan 70% pendapatan pemerintah, dengan cadangan minyak terbukti sebesar 12 miliar barel. Sumber daya minyak Yaman sangat bergantung pada perekonomian negara, yang menyumbang hampir 25% PDB dan 70% pendapatan pemerintah. Pada tahun 2011, PDB Yaman diperkirakan mencapai US\$ 58,71 miliar.

Karena sebagian besar wilayah Yaman belum dieksplorasi dan masih banyak ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, pemerintah Yaman membuka kesempatan bagi perusahaan minyak internasional untuk menjadi produsen minyak dan gas di Yaman untuk memenuhi kebutuhan pasar global. (Setiawan, 2018).

Wajar jika Yaman menjadi favorit eksplorasi perusahaan energi dan pertambangan dunia. Negara-negara tetangga yang merasa lebih kuat di wilayah tersebut merasa iri karena lokasinya yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Dengan memanfaatkan masalah Syiah dan Iran sebagai alasan untuk melakukan penyerangan, rakyat Yaman pada akibatnya harus berjuang melawan Koalisi Arab Saudi yang didukung oleh AS.

Yaman memiliki potensi besar di sektor minyak, namun ketergantungan pada sumber daya ini, ditambah dengan konflik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan politik, menjadikan pengendalian dan pengelolaan sumber daya ini sebagai tantangan besar.

2. Ekspansi Kawasan Teluk Aden

Teluk Aden adalah kawasan perairan yang memisahkan dua benua, yakni Asia dan Afrika. Teluk ini menghubungkan Laut Merah dengan bagian barat laut Samudra Hindia. Teluk Aden, yang berada di bagian timur laut Afrika dan berbatasan dengan perairan Somalia. Kawasan ini sering digunakan sebagai jalur pelayaran untuk mendistribusikan berbagai barang dari Asia ke Eropa, dan sebaliknya, melalui Terusan Suez di Mesir. (Prasetyo, 2016).

Wilayah strategis Yaman menjadikannya jalur transportasi antara negara, terutama di Teluk Aden dan Selat Bab el Mandab. Kapal tanker minyak dan kapal kargo melintasi kedua lokasi

tersebut. (Putra et al., 2019). Selat ini merupakan antara jalur pelayaran paling sibuk di dunia, dengan sekitar 30% dari total perdagangan minyak global melalui rute ini setiap harinya. Oleh karena itu, penguasaan Yaman menjadi sangat penting bagi Arab Saudi untuk menjaga akses dan keamanan rute pengiriman minyaknya. (Muharjono, 2013).

Selat ini juga menjadi ancaman dari Iran, Arab Saudi khawatir dengan meningkatnya pengaruh Iran di Yaman, terutama melalui kelompok Houthi. Jika Houthi berhasil menguasai Selat Bab elMandeb, hal ini bisa mengancam jalur pelayaran minyak Saudi. Dengan memperluas kehadiran militernya dan membentuk entitas baru, Arab Saudi berusaha mengamankan kawasan dari potensi ancaman.

Selain itu, Arab Saudi juga telah melaksanakan proyek besar seperti Proyek Pipa Minyak Trans Arabia yang dirancang untuk memberikan jalur alternatif pengiriman minyak yang lebih aman dari ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Motif Insentif Solidaritas

Yaman adalah bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Respons terbesar di dunia. Di ambang kelaparan selama empat tahun terakhir. Negara ini terabaikan, sangat kekurangan dana, dan sangat berbahaya. Ini adalah narasi yang diputarbalikkan dan diperkuat oleh mereka yang memimpin respons internasional di Yaman, baik di tingkat kemanusiaan maupun politik, dari jabatan di Yaman hingga pimpinan kemanusiaan teratas di New York, Jenewa, dan Roma. (Vuylsteke, 2021).

Perang saudara di Yaman dimulai pada bulan Maret 2015 dan saat ini masih berlangsung dalam hal pertempuran dan komplikasi. Konflik telah berlangsung selama bertahun-tahun tetapi perang saudara yang sebenarnya ditandai pada tahun 2015 karena saat itulah koalisi yang dipimpin Saudi terlibat. Pengangguran besar-besaran, kerawanan pangan, bom bunuh diri, dan gerakan separatis di Yaman Selatan semuanya menandai transisi politik. (Soni, 2018).

Konflik internal di antara pemerintahan yang dibantu oleh Arab Saudi dan milisi Houthi yang dibantu oleh Iran telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan infrastruktur dasar di Yaman. Penyebaran penyakit seperti kolera dan campak, kekurangan makanan bergizi dan air bersih, serta kemerosotan ekonomi secara umum turut membantu situasi ini.

Perekonomian Yaman rusak secara signifikan akibat konflik panjang. Impor makanan menjadi dominan, namun pasokan pangan terganggu oleh perang di Ukraina dan larangan ekspor gandum oleh India. Stok gandum negara pun berisiko habis pada pertengahan Juli 2022. Konflik yang melibatkan beberapa faksi ini telah menewaskan puluhan ribu orang. (Bimo, 2024).

Lebih dari 2,8 juta orang telah menjadi pengungsi internal sejak konflik dimulai, dan 14 juta dari mereka tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan. Ekonomi yang rapuh dan lemah mengganggu produksi minyak dan kegiatan ekonomi lainnya, menyebabkan produk domestik bruto (PDB) turun sebesar 28 persen pada tahun 2015.

Situasi kemanusiaan di Yaman sangat memprihatinkan. Karena ketidakstabilan politik, harga komoditas naik dan pengangguran meningkat. Lebih dari 10 juta orang, atau 44% dari populasi, rawan pangan, menurut Program Pangan Dunia PBB pada 2012. 5 juta orang di antaranya sangat rawan pangan dan tidak dapat memproduksi atau membeli makanan yang mereka butuhkan. Dengan 2 juta anak balita, hampir setengahnya mengalami kekurangan gizi kronis, malnutrisi anak adalah yang tertinggi di dunia. Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi di Sanaa memperkirakan tingkat pengangguran mencapai 50%. (Pangestu, 2019).

Tingkat kekurangan gizi di kalangan wanita dan anak-anak di Yaman masih termasuk yang tertinggi di dunia, dengan 1,3 juta wanita yang sedang hamil atau menyusui memerlukan perawatan untuk kekurangan gizi parah. Sementara itu, anak-anak Yaman terus terbunuh dan terluka akibat konflik dan angka kematian terus meningkat akibat penyakit yang dapat dicegah dan kekurangan gizi. 2,2 juta anak saat ini berusia di bawah lima tahun di Yaman memerlukan perawatan untuk kekurangan gizi akut. Lebih dari 2,5 juta anak putus sekolah atau tidak bersekolah, dan 8,6 juta anak usia sekolah memerlukan bantuan pendidikan. (UNHCR, 2024).

Krisis di Yaman adalah contoh klasik dari krisis kemanusiaan yang kompleks, dimana intervensi internasional dan respons lokal saling terkait dalam upaya mengatasinya. Namun, tantangan struktural dan politik yang kuat membuat sulit mencapai solusi efektif tanpa perdamaian dan stabilitas politik yang stabil.

Dalam merespons situasi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Strategi Ketahanan Pangan Nasional (NFSS), yang terdiri dari tujuh rencana tindakan, diharapkan dapat mencapai target ketahanan pangan di Yaman. Namun, strategi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu singkat, dan Yaman juga menghadapi masalah kekurangan anggaran dana, yang akhirnya menyebabkan penerapan NFSS dihentikan.

Kegagalan pemerintah Yaman untuk mengambil tindakan darurat untuk menangani krisis pangan memaksa mereka untuk bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan internasional guna mendapatkan bantuan. World Food Programme adalah salah satu program kemanusiaan internasional terbesar yang membantu Yaman dengan makanan. (Swadevi et al., 2016).

Dari insentif solidaritas yang terjadi di Yaman, dapat disimpulkan yang melibatkan berbagai alasan motif kemanusiaan :

- Meringankan Kesengsaraan: Konflik kemanusiaan di Yaman telah mengakibatkan jutaan orang menderita kelaparan, penyakit, dan kekurangan kebutuhan dasar. Dorongan solidaritas sering kali timbul dari keinginan mendesak untuk menyelamatkan nyawa.
- Kewajiban Internasional: Banyak negara dan organisasi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sesama manusia yang berada dalam situasi darurat.
- Peran Organisasi Internasional: Badan World Food Programme membantu mengatasi krisis pangan dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Yaman.

Motif Insentif Idealisme

Perang saudara yang brutal di Yaman telah berkecamuk selama hampir satu dekade, menciptakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di zaman modern. Meskipun agama bukanlah pendorong utama konflik di Yaman, kelompok-kelompok besar yang terlibat dalam pertempuran tersebut memang berbeda dalam hal identitas agama, dan fakta ini berarti bahwa agama telah menjadi hal yang menonjol dalam hal bagaimana konflik tersebut dipersepsikan dan dipahami oleh beberapa pengamat. (Al-Deen, 2023).

Perbedaan etnis dan agama di Yaman melibatkan berbagai kelompok agama dan etnis, seperti Sunni dan Syiah. Selama berabad-abad, konflik antara kelompok-kelompok ini telah berlangsung. Ketidakpuasan ekonomi dan politik sering kali menjadi penyebabnya. (Hadi, 2024).

Umat Muslim di Yaman terbagi menjadi Sunni mayoritas dari mereka mengikuti mazhab hukum Syafi'i yang mencakup sekitar dua pertiga dari populasi, dan beberapa kelompok Syiah: Zaydi, yang mencakup sekitar sepertiga dari populasi ; sekitar 100.000 Ismaili ; dan komunitas Khoja yang sangat kecil (pengikut Dua Belas Syiah) di kota Aden. Tren Sunni relevan lainnya adalah Salafisme, yang asal-usulnya sebagai gerakan yang sangat konservatif dan kaku secara doktrinal (meskipun sebagian besar apolitis) dimulai pada tahun 1980-an. Baru-baru ini, Salafi Yaman telah mengambil peran politik yang lebih menonjol dengan dukungan dari kekuatan eksternal sama seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang memandang orientasi antiSyiah Salafisme berguna untuk mengimbangi pengaruh Iran di Yaman. (AlDeen, 2023)

1. Ideologi Arab Saudi

Dinasti Saud Didirikan di daerah Najd di bagian tengah Semenanjung Arab pada abad ke-18. Pendirian dinasti ini dimulai ketika seorang tokoh politik bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Sa'ud (1703–1792) bertemu dengan Muhammad Ibnu Wahab, seorang penyebar mazhab Hanbaliyah. Abd al-Wahhab memiliki keinginan kuat untuk memerdekakan Islam dari

kerusakan yang dia anggap telah menggerogoti agama. Pada periode ini, modernitas telah mengubah cara pandang manusia tentang dunia nyata dengan memasukkan gagasan-gagasan yang menggemparkan pikiran orang dan menambah kompleksitas struktur sosial dan ekonomi. Kedua figur ini membuat keputusan untuk membentuk Daulah Islamiyah dengan menyatukan pengetahuan mereka. Setelah itu, keluarga Al-Saud mengadopsi mazhab Wahabi, yang membantu memperkuat kekuasaan mereka dan memperluas pengaruh mereka di semenanjung Arab.

Wahabi adalah sebuah gerakan Islam yang mempromosikan purifikasi ajaran Islam. Gerakan ini dicetuskan oleh Muhammad bin Abd al-Wahab sekitar tahun 1800, dengan Arab Saudi sebagai pusat. Wahabi menyebar dengan cepat, didukung oleh kerajaan Saud. Keturunan Bani Saud saat itu, Muhammad ibn Saud, bekerja sama dengan Muhammad bin Abd al-Wahab untuk menyebarkan ideologi tersebut. Setelah Arab Saudi didirikan sebagai negara pada tahun 1932, Wahabi dinyatakan sebagai ideologi negara Arab Saudi. (Murofikoh, Dede Ika, 2022).

Di antara berbagai prinsip dan ajaran Wahhabi adalah :

- 1) Mengembalikan Islam ke Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumbernya (mutlak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah),
- 2) Pemahaman Islam tentang tauhid yang sesat dan berfokus mengenai tauhid 'ubudiyah,
- 3) Bertindak jelas terhadap semua wujud ajaran sesat, bidaah dan takhayul. Kaum Wahabi menganggap, segala sesuatu yang tidak memiliki referensi dari Nabi dianggap menyimpang, yang mengakibatkan tidak berkualifikasi dalam komunitas Wahhabi dalam melaksanakan ajaran agama dengan cara yang selalu berubah,
- 4) Membangkitkan kembali jihad, dan sebagainya. (Wafi, 2018).

2. Ideologi Yaman

Ideologi agama di Yaman sering kali terkait dengan konflik politik, terutama antara kelompok Houthi (yang menganut Syiah Zaidiyah) dan pemerintah dibantu oleh negara-negara Sunni seperti halnya Arab Saudi. Ketegangan ini menciptakan situasi yang kompleks di mana ideologi agama berinteraksi dengan dinamika kekuasaan politik. (Indonesia, 2022).

Zaydi merupakan komunitas Syiah terbesar di Yaman. Yaman adalah satu-satunya negara dengan komunitas Zaydi yang besar, menjadikan Zaydiisme sebagai ciri khas budaya Yaman. Meskipun merupakan kelompok yang relatif kecil di negara tersebut, Setelah penarikan pasukan Ottoman pada akhir Perang Dunia I, Imamah Zaydi (sebutan negara itu) melanjutkan kekuasaannya di Yaman utara, sementara Inggris menduduki Aden dan menguasai wilayah selatan dari tahun 1839-1967. Imamah Zaydi terus memerintah Yaman Utara hingga digulingkan oleh revolusi

republik tahun 1962. Bahkan hingga saat ini, pengaruh Muslim Zaydi terus memainkan peran penting dalam lanskap keagamaan Yaman.

Meskipun Zaydi merupakan bagian dari Syiah, aspek-aspek kepercayaan mereka khususnya berkenaan dengan masalah akidah dan yurisprudensi sangat dekat dengan Islam Sunni. Ada pula perbedaan signifikan dengan cabang-cabang Syiah lainnya, mungkin elemen pembeda dan kontroversial utamanya adalah teori politik yang mengharuskan para penguasa menjadi keturunan Nabi ajaran yang membuat Zaydi menolak kendali eksternal dan yang terus memengaruhi dinamika konflik pada periode kontemporer. Beberapa Zaydi lebih suka mengidentifikasi diri mereka sebagai sekte yang terpisah sama sekali, terpisah dari denominasi Sunni dan Syiah. (Al-Deen, 2023).

Pandangan ideologis di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh Wahhabisme, yang menjadi dasar hukum dan kebijakan negara tersebut. Sementara Yaman menunjukkan keberagaman mazhab dengan dinamika konflik yang kompleks akibat perbedaan ideologi. Hubungan kedua negara seringkali diwarnai dengan ketegangan politik yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran agama dan konflik kepentingan geopolitik.

KESIMPULAN

Ada tiga motif utama yang mendorong keterlibatan dalam konflik ini:

1. **Motif Insentif Material**, Ada dua komponen yang mempengaruhi hal ini yaitu motif insentif material yaitu merebut menguasai minyak bumi dan memperluas kawasan teluk. Letak geopolitiknya yang posisi strategisnya dan kekayaan alamnya membuat negara tetangga yang merasa paling kuat di wilayah itu iri. Rakyat Yaman akhirnya harus berjuang untuk mempertahankan diri melawan Koalisi Arab Saudi yang didukung AS dengan memanfaatkan isu-isu Syiah dan Iran sebagai dalih untuk melakukan invasi.
2. **Motif Insentif Solidaritas**, Yaman adalah bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Respons terbesar di dunia. Di ambang kelaparan selama empat tahun terakhir. Negara ini terabaikan, sangat kekurangan dana, dan sangat berbahaya. Ini adalah narasi yang diputarbalikkan dan diperkuat oleh mereka yang memimpin respons internasional di Yaman, baik di tingkat kemanusiaan maupun politik, dari jabatan di Yaman hingga pimpinan kemanusiaan teratas di New York, Jenewa, dan Roma.
3. **Motif Insentif Idealisme**, Perang saudara yang brutal di Yaman telah berkecamuk selama hampir satu dekade, menciptakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di zaman modern. Meskipun agama bukanlah pendorong utama konflik di Yaman, kelompok-kelompok besar yang terlibat dalam pertempuran tersebut memang berbeda dalam hal identitas agama, Perbedaan agama dan etnis di Yaman terjadi karena ada banyak kelompok agama dan etnis yang berbeda, seperti Sunni dan Syiah. Selama berabad-abad, konflik ini telah berlangsung, dan terkadang dipicu oleh ketidakpuasan ekonomi dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Deen, M. S. (2023). Yemen Religion, Peace and Conflict Country Profile. Di akses pada 28 Desember 2024 dari <https://www.usip.org/programs/religion-and-conflict/countryprofiles/yemen>
- Aldino, A. P. GEOPOLITIK: TEORI DAN KAJIAN.
- Alhadar, S. et al. (2022) 'KAJIAN PERAN DAN MOTIF : PARTAI MAHASISWA INDONESIA (PMI) DALAM PERSPEKTIF PHILANTHROPY', IX, pp. 413–421.
- Al-Qadhi, M. H. (2017). The Iranian role in Yemen and its implications on the regional security. Arabian Gulf Centre for Iranian Studies.
- Afifah, I., dan Sopiany, H. M. (2017). Penerapan Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode Eksperimen Dan Metode Talking Stick Terhadap Motivasi Belajar Dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Tekanan. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA, 87 (1,2), 149–200.
- Arianto, A., Zetra, A. dan Fadhilah, R.R. (2021) 'Konflik Politik dalam Kepengurusan Partai di Sumatera Barat', 1(1), pp. 76–84.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT.Rineka Aris Sarjito dan Editha Praditya Duarte. (2023). Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global. Bandung: Indonesia Emas Group.
- Murofikoh, Dede Ika, D.I.A. dan N. (2022) 'Perbandingan Ideologi Negara Indonesia dengan Arab Saudi', 1(02), pp. 188–196
- Mustahyun (2016) 'Rivalitas Arab Saudi Dan Iran Di Timur Tengah Pada Arab Spring Suriah Tahun 2011 2016', 1(1).
- Natasya, P. P. (2023). Kepentingan Nasional Amerika Serikat dalam Menginisiasi Pembentukan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) (Doctoral dissertation).
- Nirwasita, J. dan Latupella, G.C. (2024) 'Dampak Politik Konflik Yaman Tahun 61 2011', 5(1), pp. 7–13
- Priambodo, S. (2017) 'Motif Intervensi Arab Saudi Terhadap Perang Saudara di Yaman', 6(1), pp. 205–216.
- Rizki Pratama, P. (2018). Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Konflik Yaman Untuk Membendung Pengaruh Iran Di Timur Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

- Putra, R.P. et al. (2019) 'INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK YAMAN UNTUK MEMBENDUNG PENGARUH IRAN DI 62 TIMUR TENGAH', 4(1), pp. 76–99.
- Saputra, A.A. and Al-hamdi, R. (2020) 'Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi)', 11(2), pp. 163–182. Available at: <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.163-182>.
- Sari, A.I. (2020) 'Peranan Organisasi Regional Liga Arab Dalam Penyelesaian Konflik Yaman Arab Saudi Tahun 2011-2017.Skripsi thesis, Universitas Airlangga', pp. 1–20.
- Sastrohamidjojo, H. (2021). Kimia Minyak Atsiri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setiawan, A. (2018). Yaman Negara Kaya Sumber Daya Alam Yang Bikin Iri Arab Saudi. Diakses pada 02 Januari 2025 dari <https://nusantaranews.co/yaman-negara-kaya-sumber-daya-alam-yangbikin-iri-arab-saudi/>
- Soni, S. (2018). Earlier this year, The Strategy Bridge asked university and professional military education students to participate in our first annual writing contest by sending us their thoughts on strategy. Di akses pada 02 Januari 2025 dari <https://thestrategybridge.org/thebridge/2018/10/30/terrorism-in-civil-wars>
- Soepandji, K.W. (2020) 'Geopolitik, Negara, dan Bangsa Masa Kini', Jurnal Lemhannas RI, 7(1), pp. 41–58. Available at: <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.50>.

TATA KELOLA PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN BERDASARKAN PENIMBUNAN ANAK SUNGAI DI KOTA PALEMBANG

Miftahul Azmi, Reni Rentika Waty

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²

Email: Mfthlzm@gmail.com

ABSTRACT

The City of Palembang, as one of the largest cities in South Sumatra, faces challenges in managing urban growth and development. In the 1930s, the number of Musi River tributaries in Palembang reached 316. However, now the number is only 95 tributaries, so during the existence of Indonesia, Palembang has lost 221 tributaries due to land conversion. The purpose of this study is to determine the governance of urban development in Palembang City and to determine the impact on the community of the filling of tributaries on this governance. The type of research used in this study is descriptive research using a qualitative approach. The results of this study indicate that in Palembang City, the phenomenon of the need for land tends to continue to increase due to the increasing population growth, resulting in symptoms of land use competition and in the planning process, utilization and control of space utilization has not taken place as expected. This study also found the impact of the filling of tributaries such as flooding and water pollution.

Keywords: *Development of urban areas, Filling of tributaries, Palembang City.*

ABSTRAK

Kota Palembang yang sebagai salah satu kota terbesar di Sumatera Selatan, menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan dan pembangunan wilayah perkotaan. Tahun 1930-an, jumlah anak Sungai Musi di Palembang mencapai 316. Namun, kini jumlah tersebut tinggal 95 anak sungai, jadi selama Indonesia berdiri Palembang telah kehilangan 221 anak sungai akibat alih fungsi lahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pengembangan wilayah perkotaan di Kota Palembang dan untuk mengetahui dampak bagi masyarakat atas penimbunan anak sungai terhadap tata kelola tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kota Palembang fenomena kebutuhan terhadap lahan cenderung terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga melahirkan gejala persaingan penggunaan lahan dan pada proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini juga menemukan adanya dampak dari penimbunan anak sungai seperti banjir dan pencemaran air.

Kata kunci: Kota Palembang, Pengembangan wilayah perkotaan, Penimbunan anak sungai

LATAR BELAKANG

Wilayah urban atau wilayah perkotaan banyak mengalami permasalahan tentang tata ruang yang menyebabkan perkotaan tersebut tidak tertata dengan baik bahkan menjadi buruk. Penyusunan tata kelola yang terjadi di Kota Palembang sangat memprihatinkan karena kepadatan

penduduk yang terjadi tidak sebanding dengan tata ruang yang ada di Kota Palembang. Pengelolaan pembangunan yang tidak tertata dengan baik sehingga banyak masyarakat yang melakukan pembangunan secara liar. Jumlah penduduk yang meningkat di negara berkembang membawa dampak besar terhadap laju pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk, serta mempengaruhi pemanfaatan ruang yang sudah ada. Kondisi ini terlihat dari pesatnya alih fungsi lahan akibat meluasnya aktivitas perkotaan hingga ke wilayah pinggiran (Krimasta, 2020).

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kota Palembang secara otomatis memicu berbagai permasalahan. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas lahan yang tersedia untuk tempat tinggal menyebabkan terjadinya kepadatan. Salah satu dampak utamanya adalah persoalan hunian. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan penyediaan fasilitas umum turut berkontribusi pada menurunnya kualitas permukiman. (Cindy Oktaviola, 2022).

Kota Palembang sebagai suatu kota terbesar di Sumatera Selatan, menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan dan pembangunan wilayah urban. Berdasarkan budayawan Palembang, Djohan Hanafiah, pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1930-an, terdapat sekitar 316 anak Sungai Musi di Palembang. Namun, jumlah tersebut telah berkurang drastis, menyisakan hanya puluhan anak sungai, itupun sebagian besar dalam kondisi yang memprihatinkan. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwasannya anak sungai musik sekarang tinggal 95 anak sungai, jadi selama Indonesia berdiri Palembang telah kehilangan 221 anak sungai akibat alih fungsi dan penimbunan.

Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menyebabkan meningkatnya kepadatan bangunan yang tersebar secara tidak teratur, sehingga memberikan tekanan pada area sekitarnya, terutama di kawasan tepi air atau bantaran sungai. Penyebaran bangunan yang tidak terkendali ini berdampak pada munculnya pemukiman di sekitar bantaran sungai. Selain itu, tingginya harga lahan di perkotaan serta lemahnya kondisi ekonomi sebagian masyarakat mendorong warga untuk melakukan pemanfaatan terhadap lahan kosong, seperti bantaran sungai, dengan mendirikan permukiman yang tidak teratur (Muhammad Ananta Firdus, 2021).

Dalam Peraturan Walikota Palembang No. 55 Tahun 2014 tentang "Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai", dijelaskan pada BAB II Pasal 4 bahwa jarak antara bangunan dan sungai ditentukan berdasarkan kedalaman sungai. Jika dalam nya sungai kurang 3 meter, maka jarak sempadan yang diperbolehkan adalah 10 meter. Untuk kedalaman antara 3 hingga 20 meter, sempadannya ditetapkan sebesar 15 meter. Sementara itu, jika kedalaman melebihi 20 meter, maka sempadan sungai yang diperbolehkan minimal 30 meter (Peraturan Walikota Palembang tahun 2014).

Diketahui bahwa terdapat larangan memanfaatkan bantaran sungai untuk aktivitas yang dapat mengurangi fungsi sungai sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tepatnya pada Pasal 157 (Restu, 2021).

Penimbunan anak sungai tersebut bisa menimbulkan banjir besar besaran setiap tahunnya, Banjir terjadi perkiraan sekitar di akhir tahun atau di pertengahan tahun. Kawasan kelurahan silaberanti tersebut merupakan kawasan dataran rendah, sehingga jika terjadi hujan dan pasang tahunan airnya akan ditampung di anak sungai tersebut. Akan tetapi pada saat sekarang ini anak sungai tersebut sudah ditimbun dan dijadikan pemukiman oleh masyarakat Kelurahan Silaberanti tersebut. Sehingga jika air hujan mulai naik, dan pasang tahunan akan datang maka terjadinya peluapan air hingga ke jalanan raya dan air banjir juga sering masuk kerumah rumah warga. Masyarakat yang melakukan penimbunan anak sungai di Kelurahan Silaberanti Kota Palembang tersebut tidak mempunyai izin terhadap Pemerintah, dan juga masyarakat sekitar yang melakukan penimbunan tersebut tidak mempunyai sertifikat rumah, banyak masyarakat yang melakukan penimbunan tersebut tidak takut untuk digusur malahan banyak masyarakat yang merenovasi rumah itu menjadi rumah batu yang bagus.

Padahal jika pemerintah ingin membuat DAS (Daerah Aliran Sungai) atau pemerintah ingin mengambil alih anak sungai tersebut maka tidak adanya ganti rugi ke pihak rumah yang digusur karena mereka membangun anak sungai itu tidak mempunyai izin dan juga tidak mempunyai sertifikat rumah. Akan tetapi masyarakat masih berleha leha dan masih melakukan renovasi rumah karena tidak adanya tindak tegas dari pemerintah atas perilaku masyarakat terhadap penimbunan anak sungai tersebut.

Menurut warga Kelurahan Silaberanti menyatakan anak sungai musi (sungai aur) tersebut yang asal usul nya berjarak lebarnya sebesar 8 M, namun dengan adanya masyarakat pendatang baru yang tidak mempunyai sertifikat tanah atau rumah sehingga melakukan penimbunan anak sungai tersebut dengan dikit demi sedikit dan hingga kini habis sudah menjadi pemukiman. Penimbunan anak sungai musi yang terjadi di Kelurahan Silaberanti sangat mengkhawatirkan karena air sungai dan luapan air hujan yang seharusnya ditampung oleh anak sungai musi kini harus meluap ke jalanan dan merusak lingkungan. Meski telah mengetahui hal tersebut, warga sekitar masih acuh karena tidak ada nya sanksi tegas yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena adanya persoalan ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian untuk menemukan fakta melalui berbagai pertanyaan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual mengenai variabel-variabel yang diteliti, serta mendeskripsikan situasi penelitian berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya dan relevan dengan topik Tata Kelola Pengembangan Wilayah Perkotaan di Kota Palembang. Penelitian ini berlokasi di Kota Palembang yang berfokus pada Kelurahan Silaberanti, penulis melakukan penelitian ini kurang lebih selama satu bulan, dengan sasaran Masyarakat serta Instansi Pemerintah yang terkait,

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada informan. Penelitian ini menyajikan penataan dan pengelolaan secara kualitatif melalui penjabaran dalam bentuk kalimat-kalimat yang menekankan pada keaslian data. Pendekatannya tidak menolak teori, tetapi berfokus pada fakta-fakta nyata yang ditemukan langsung di lapangan. (Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, 2020).

HASIL DAN DISKUSI

Pada hal ini, peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang akan menjadi bagian utama dari skripsi ini. Bagian ini akan membahas rumusan masalah. Pertama, yaitu bagaimana tata kelola pengembangan wilayah perkotaan di Kota Palembang, serta dampak bagi masyarakat atas penimbunan anak sungai terhadap tata kelola tersebut. Kedua permasalahan tersebut akan peneliti analisis menggunakan teori Urban Design yang dikemukakan oleh Jane Jacobs.

Tata Kelola Pengembangan Wilayah Perkotaan Di Kota Palembang.

Pemerintah Republik Indonesia telah merancang pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan melalui pengembangan tata ruang dalam kerangka lingkungan hidup yang dinamis, namun tetap menjaga kelestariannya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi, saat ini. Perencanaan tata kelola wilayah menjadi suatu isu utama dalam perkembangan pembangunan daerah. Dengan laju perkembangan wilayah yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, masalah lingkungan dan tata ruang kota menjadi hal yang sangat penting dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang (Pratama, 2019). Dalam mengelola pengembangan wilayah, diperlukan desain tata kelola yang kompleks sebagai pedoman dalam proses pengembangan tersebut. Salah satu aspek penting dalam pengembangan wilayah adalah bagaimana pemerintah menetapkan tugas pokok dan fungsinya dalam mengembangkan wilayah tersebut (Rahmawati, 2024).

Pada pembahasan ini peneliti menggunakan teori Urban Design yang di kembangkan oleh Jane Jacobs, di dalam teori tersebut ada 3 dimensi dalam perancangan kota menurut Jane Jacobs antara lain Penggunaan lahan, ketersediaan SDM, efektivitas tata ruang (Gomez, 2022) berikut penjelasannya :

1. Penggunaan Lahan.

Perencanaan dan desain pengembangan kawasan perkotaan memiliki peran yang sangat krusial sebagai pengendali, rancangan pengembangan kawasan menjadi krusial untuk memberikan peraturan yang cocok dengan kondisi kawasan. Ini meliputi distribusi lahan untuk berbagai jenis fungsi dan aktivitas. Setiap proses pengembangan kota perlu disertai dengan perencanaan tata guna lahan. Meski demikian, perumusan rencana pengembangan kota kerap

menghadapi kendala akibat keterbatasan akurasi data di lapangan, yang dapat menyebabkan inefisiensi pada rancangan tersebut karena tidak aplikatif. Dampak dari rancangan yang tidak sesuai ini adalah munculnya dampak merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di suatu area (nurlaili, 2018). Pemanfaatan lahan yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan pada struktur kota. Kawasan permukiman merupakan salah satu elemen paling menonjol dalam tata guna lahan di wilayah perkotaan. Ketidaksesuaian dalam penataan permukiman ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan kota, sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan tata kota. Penimbunan anak sungai terjadi karena tidak teraturnya tata kelola perkotaan serta dengan adanya kebutuhan lahan dan lahan di sekitar permukiman juga terbatas maka masyarakat memanfaatkan area anak sungai sebagai lahan tambahan untuk membangun rumah apalagi hal tersebut dilakukan juga karena faktor kurangnya pengawasan dari pihak Pemerintah setempat.

Penimbunan terjadi sudah dilakukan secara turun temurun yang di mulai pada tahun 1980-an dan yang melakukan pun awalnya hanya pendatang yang tidak mempunyai lahan di Kota Palembang. Berikut gambar peta sungai di kota Palembang pada tahun 1980 hingga sekarang.

Gambar 1 Peta sungai tahun 1980-an.



Sumber: Palembang Musi

Bisa di lihat pada gambar peta sungai di atas bahwa pada tahun 1980 an masih banyak aliran anak sungai yang menyebar di Kota Palembang. Pada tahun itu sebenarnya sudah mulai terjadi penimbunan tapi masih beberapa dan belum terlalu kelihatan, akan tetapi dengan berjalannya waktu Palembang mulai mengalami transformasi dari kota perdagangan tradisional berbasis sungai menjadi kota modern yang menitikberatkan pembangunan daratan.

Gambar 2 Peta Sungai Musi tahun 2019



Sumber: (Mujib, 2019)

Berdasarkan peta sungai Kota Palembang di atas bahwasannya kita tahu bahwa anak sungai musu ada banyak sekali dulunya dan cenderung lebih besar akan tetapi perubahan yang sekarang sangat signifikan sebagian anak sungai ada yang menyempit bahkan menghilang, sangat disayangkan karena semakin kecil aliran tersebut maka dampaknya semakin besar terhadap lingkungan. Dan hal ini terjadi karena adanya keterbutuhan lahan yang membuat masyarakat berfikir untuk melakukan penimbunan.

Kota Palembang fenomena kebutuhan akan lahan terus mengalami peningkatan sejalan dengan kemajuan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk. Kondisi ini memicu terjadinya kompetisi dalam pemanfaatan lahan, yang mencerminkan prinsip dasar hukum permintaan dan penawaran. Hal ini wajar terjadi mengingat lahan merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan berkaitan erat dengan hampir seluruh aspek kehidupan serta pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan meluasnya wilayah, termasuk ekspansi perkotaan, permintaan terhadap lahan pun meningkat. Namun, dari sisi ketersediaan, luas lahan yang tersedia dalam batas wilayah administratif tetap terbatas..

Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang pesat serta meningkatnya aktivitas pembangunan di berbagai sektor akan memicu tingginya permintaan terhadap lahan. Kondisi ini mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan yang membuat masyarakat melakukan penimbunan anak sungai demi memenuhi kebutuhan papan (tempat tinggal) nya. penimbunan anak sungai dilakukan karena keterbutuhan tempat tinggal, yang awalnya hanya membangun rumah panggung biasa di atas anak sungai sebagai tempat singgah namun karena belum ada tindak tegas dari pemerintah pada saat itu sehingga terjadilah penimbunan secara permanen hingga saat ini. Berikut kondisi rumah warga yang terdampak banjir karena melakukan penimbunan.

Gambar 3 kondisi rumah warga yang melakukan penimbunan



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Pada gambar di atas dapat menggambarkan tentang tata letak pemukiman masyarakat yang ada di Kelurahan Silaberanti, merupakan Pemukiman yang padat dan saling berhimpitan, dengan gang-gang sempit dengan lebar antara satu hingga dua meter, lorong tersebut berfungsi ganda sebagai jalur akses keluar-masuk rumah dan juga menjadi tempat terjadinya interaksi sosial antarwarga., pemukiman sering terjadi banjir sehingga kawasan selalu terkesan kumuh. Kondisi kumuh berasal dari rusak nya sistem penggunaan lahan karena berdasarkan gambar diatas bahwa banyak masyarakat yang melakukan penimbunan terhadap anak sungai sehingga menyebabkan banjir dan pemukiman juga menjadi semrawut.

2. Ketersediaan SDM

Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional untuk kebutuhan perkotaan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas adalah individu yang menguasai, pengetahuan, kompetensi, dan etika yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat perkotaan (Sulistianingsih, 2019). Sumber daya manusia yang profesional dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, inovasi, dan daya saing di perkotaan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional untuk kebutuhan perkotaan, diperlukan perencanaan yang baik dan terintegrasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam tata kelola perkotaan sangat penting untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan kota yang berkelanjutan. SDM yang berkualitas akan mempengaruhi efektivitas kebijakan, perencanaan, dan implementasi berbagai program di tingkat kota.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia turut menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perkotaan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh para staf kelurahan. Dapat kita ketahui bahwa dalam masalah ini belum ada Koordinasi serta kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan

masyarakat sangat diperlukan, mengingat adanya perbedaan sudut pandang antara keduanya terkait penimbunan anak sungai ini memperjelas bahwa dalam penerapan kebijakan masyarakat sangat kurang keterlibatannya. Selain masyarakat kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan perkotaan yang baik. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah sama-sama mempunyai peran aktif dalam membangun tata kelola perkotaan sehingga terciptanya penataan kota yang tertata rapi dengan memastikan bahwa kebijakan kota lebih inklusif dan mencakup kebutuhan berbagai kelompok.

3. Efektivitas Tata Ruang

Konsep tata ruang secara umum terkait erat dengan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara khusus, konsep ini berfokus pada pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Darto, 2018). Pemanfaatan ruang yang tepat, efektif, dan efisien dapat mengurangi kecenderungan Pemerintah PUPR menerapkan Peraturan Menteri ATR/BPN No.5 tahun 2024 sebagai landasan peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang yang ditetapkan pada 20 februari 2024 dan diundangkan pada 27 februari 2024 (Peraturan Menteri tahun 2024).

Penyusunan rencana tata ruang hingga saat ini masih belum dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Secara umum, implementasi rencana tata ruang di lapangan juga belum dijalankan secara tegas regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan dan ruang kota dalam berbagai kondisi seringkali hanya menjadi formalitas dalam kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan wilayah perkotaan. Padahal, penataan ruang memegang peranan vital dalam meningkatkan kualitas hidup warga serta menunjang sektor ekonomi melalui pemanfaatan ruang yang aman, tertib, nyaman, dan selaras. Berikut pada gambar 4 yang menggambarkan kondisi rumah warga yang mendirikan rumah di sempadan sungai.

Gambar 4 Mendirikan rumah di sempadan sungai



Sumber : dokumentasi penulis, 2025

Gambar di atas dapat membuktikan bahwa pengimplementasian kebijakan pemerintah belum dilakukan secara merata masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran atas aturan

tentang mendirikan rumah sempadan sungai padahal hal tersebut sudah di atur dalam Peraturan Walikota Palembang.

Dalam pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk mencapai ketiga aspek tersebut, pelaksanaan pembangunan perlu berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Ardhana, 2024). Dalam proses perancangan tata kota, berbagai tantangan dapat muncul akibat Keterlibatan berbagai pihak atau stakeholder terbagi menjadi tiga kategori: stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok yang merasakan dampak langsung dari suatu rencana, baik dampak positif maupun negatif, dan memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan—dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena dampak. Stakeholder kunci adalah pihak yang memiliki otoritas legal untuk mengambil keputusan, yaitu pemerintah. Sedangkan stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak terdampak secara langsung, namun tetap menunjukkan kepedulian serta berperan penting dalam proses pembangunan, seperti lembaga swasta, institusi perbankan, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan pihak pendukung lainnya (Nurlaili, 2018).

Dampak Bagi Masyarakat Atas Penimbunan Anak Sungai Terhadap Tata Kelola Perkotaan.

Penimbunan anak sungai memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tata kelola perkotaan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek mulai dari lingkungan, social maupun ekonomi. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan staff bagian Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang mengatakan bahwa adapun dampak bagi masyarakat yang melakukan penimbunan anak sungai terhadap tata kelola yaitu :

1. Banjir

Faktor utama penyebab banjir di kota Palembang disebabkan oleh aliran air yang tidak terkendali air yang terhambat, yang disebabkan oleh penimbunan anak sungai, tingginya curah hujan, aliran air yang datang dari Sungai Musi, pompa yang tidak berfungsi, Sampah yang terdapat di sungai dan posisi drainase yang tidak tepat (Saut Sagala, 2020). Masalah utama banjir di kota Palembang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan basah menjadi lahan kering untuk pembangunan. Awalnya, banjir hanya terjadi di daerah pinggiran kota yang mayoritasnya berupa rawa dan anak sungai. Namun, dengan adanya reklamasi lahan di wilayah rawa tersebut, daerah tersebut menjadi rentan terhadap banjir dan berubah menjadi dataran banjir yang baru. Tingginya kerentanan kawasan perkotaan terhadap banjir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemajuan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta urbanisasi yang tidak dibarengi dengan perencanaan dan pengelolaan kota yang tepat, telah memicu munculnya kawasan permukiman

kumuh di dataran banjir. Selain itu, tingginya kepadatan permukiman tanpa area resapan air serta sistem drainase yang kurang memadai menjadi sejumlah faktor yang memperbesar potensi terjadinya banjir.

Suatu bencana banjir biasanya disebabkan oleh pemanfaatan anak sungai yang di salah gunakan oleh beberapa oknum masyarakat sehingga jumlah anak sungai terhadap ketersediaan lahan semakin hilang seiring dengan upaya reklamasi yang dilakukan setiap tahunnya, sementara siklus air di kota Palembang terhambat karena banyak anak sungai yang tertutup akibat penimbunan. Akibatnya, masalah yang muncul adalah ketidakseimbangan dalam pemanfaatan anak sungai di perkotaan, yang berdampak pada terganggunya siklus air dan menyebabkan degradasi wilayah serta lahan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko banjir. Berikut beberapa tempat yang terdampak banjir di Kelurahan Silaberanti. Kondisi rumah warga yang terdampak banjir berikut pada gambar 5.

Gambar 5 Kondisi yang terdampak banjir di Kelurahan Silaberanti



Sumber : Dokumentasi penulis, 2025.

Berdasarkan gambar di atas adalah rumah warga yang mengalami kebanjiran akibat dampak dari penimbunan anak sungai yang terjadi, “kondisi banjir tergenang di dalam rumah hingga ke jalanan, banjir juga bisa sampai lutut orang dewasa” ucap masyarakat Kelurahan Silaberanti. Permukiman kumuh yang berada di sepanjang tepi sungai berpotensi menghambat kelancaran aliran air. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat semestinya menyebabkan banyak dari mereka membuang limbah langsung ke sungai, fenomena ini umum terjadi di kota-kota besar. Akibatnya, aliran air menjadi tersumbat sehingga permukaan air banjir naik. Sampah organik maupun non-organik yang dibuang ke sungai menyebabkan penumpukan, yang akhirnya mengakibatkan pendangkalan atau timbunan di alur sungai.

2. Pencemaran Air

Dulunya sungai di Kota Palembang digunakan sebagai jalur transportasi menuju daerah pelosok, kini telah mengalami banyak perubahan, di antaranya menjadi saluran drainase dan

sarana penampung banjir. Sementara itu, anak-anak sungai berfungsi yang sebelumnya berperan sebagai daerah penampung air, banyak area yang kini telah ditimbun untuk keperluan sosial, sehingga beralih fungsi menjadi pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Sedimentasi sungai menjadi faktor penyebab pendangkalan atau penyempitan sungai.

Aliran air perlu diatasi agar sungai tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung pada kualitas air agar bisa untuk memastikan agar air dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, diperlukan adanya langkah-langkah pelestarian dan pengendalian. Upaya pelestarian kualitas air bertujuan untuk menjaga fungsi air agar tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan bertujuan untuk mempertahankan fungsi air sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Sebagai elemen penting dalam lingkungan hidup, air saling mempengaruhi dengan komponen lainnya. Kualitas air yang buruk dapat merusak lingkungan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan manusia dan keselamatan makhluk hidup lainnya.

Penurunan kualitas air saat ini disebabkan karena adanya sedimentasi sungai yang menyebabkan penyempitan daya tampung air serta menurunkan kekayaan sumber daya alam sehingga terjadinya peluapan air yang besar mengakibatkan pencemaran air. Air, sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat vital, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ini berarti penggunaan air untuk berbagai keperluan harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Di satu sisi, aktivitas manusia membutuhkan air yang bermanfaat, namun di sisi lain, hal tersebut berisiko menimbulkan efek merugikan, seperti pencemaran yang dapat mengganggu ketersediaan air, efektivitas penggunaannya, kemampuan daya dukung, kapasitas penampungan, serta produktivitasnya. Untuk memastikan air tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mendukung kelangsungan pembangunan, diperlukan pengelolaan kualitas air serta upaya pengendalian terhadap pencemaran air harus menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan. Penimbunan anak sungai terhadap tata kelola pengembangan wilayah perkotaan dapat dikatakan bahwa Pemerintah PUPR sudah memiliki peran aktif dalam menangani masalah penimbunan anak sungai yang melibatkan edukasi terhadap sosialisasi, serta penyusunan regulasi, tindak tegas yang dilakukan pihak PUPR sudah benar karena penimbunan anak sungai secara ilegal sangat berdampak besar bagi masyarakat sekitar selain banjir juga bisa merusak ekosistem dan pencemaran air sehingga semakin banyak tumbuhnya penyakit hal tersebut dapat dicegah mulai dari kesadaran diri masyarakat terlebih dahulu.

Untuk pemerintah serta instansi terkait, dalam penyusunan tata kelola perkotaan dapat memperhatikan tentang keterbutuhan masyarakat dalam menyediakan tempat tinggal bersubsidi yang baik agar terciptanya tata kelola perkotaan yang tersusun dan teratur. Maka dari itu untuk mencapai tata kelola perkotaan yang baik harus dilakukan kerjasama serta partisipasi antara masyarakat dan pihak pemerintah yang dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Pada hasil penelitian yang dilakukan penulis yang membahas tentang tata kelola pengembangan wilayah perkotaan berdasarkan penimbunan anak sungai di kota Palembang maka dapat disimpulkan bahwa Dalam perencanaan tata kelola kota, hal yang harus disadari adalah objek perencanaan, seperti beberapa tempat di kota Palembang yang terbilang kumuh karena faktor dari penimbunan anak sungai, karena kawasan yang ditimbun akan terlihat genangan becek.

Mereka yang melakukan penimbunan anak sungai memang pendapatannya yang cukup rendah sehingga tak mampu membeli perumahan yang layak. Di kota Palembang fenomena kebutuhan terhadap lahan cenderung terus meningkat karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi sehingga melahirkan gejala persaingan penggunaan lahan, tahapan perencanaan, penggunaan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan bahkan dalam hal ini masih belum ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Dampak dari penimbunan anak sungai terhadap tata kelola perkotaan adalah pertama, banjir yang disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan basah menjadi lahan tertutup (kering) untuk pembangunan. Kedua, pencemaran air karena adanya sedimentasi sungai dan pembuangan sampah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pendangkalan atau penyempitan aliran sungai sehingga air bersih sudah tidak ada di area sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, V. Y. (2024). Konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. *journal of computer science and information technology (JCSIT)*, 71-73.
- Darto. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah UNIKOM*, 265.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan kalijaga.
- Gomez, I. (2022). Jane Jacobs memuat ulang :operasional kontemporer vitalitas perkotaan di sebuah distrik di Barcelona. *Jurnal Hompage*, 123.
- Hasan, N. a. (2023). analisis galian dan timbunan serta biaya pada proyek normalisasi kali lamong menggunakan metode cross section. *Universitas gresik* , 8.

Miftahul Azmi, Reni Rentika Waty, Tata Kelola Pengembangan Wilayah Perkotaan Berdasarkan Penimbunan Anak Sungai di Kota Palembang, JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.4, April 30, 2025

- Husnah. (2018). APLIKASI MEMBRAN KERAMIK BUATAN DENGAN PRETREATMENT PADA PENJERNIHAN ANAK SUNGAI MUSI. *Jurnal Reoks* 3, 1.
- Imelda. (2023). Identifikasi pusat pertumbuhan dan daera hinterland Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi pembangunan*, 54-66.
- Krimasta, V. (2020). Kajian transformasi wilayah Peri Urban di Kota Manado. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 1.
- Menteri, P. no 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia ATR/BPN No.5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang
- Muhammad Ananta Firdus, R. R. (2021). Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin. *jurnal Ius Constituendum*, 424-441.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, S. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujib, M. A. (2019). Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk identifikasi perubahan sempadan Sungai Musi di Kota Palembang. *Jurnal Nasional Pendidikan*, 5.
- Nurlaili, H. m. (2018). Tata Kelola Pemukiman Nelayan di Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8-13.
- Nurlaili, H. M. (2018). Tata kelola pemukiman nelayan di wilayah perkotaan pesisir Utara Jakarta. *Jurnal Balitbang*, 9.
- Palembang, W. (2014). Peraturan Walikota Palembang tahun 2014 tentang *Penataan Bangunan di Tepi Sungai*
- Rahmawati, P. (2024). Politik tata kelola dalam pengembangan wilayah. *ilmiah ilmu pemerintahan*, 68-70.
- Restu, E. (2021). Penegakkan hukum terhadap pendirian bangunan di garis sempadan perspektif siyasah dusturiah (studi kasus di bantaran sungai Amin Kabupaten Lebong). *UIN Fatmawati sukarno*, 7.
- Saputra, H. S. (2020). Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di desa Kalibel Kabupaten Kediri. *Politik Muda*, 2.
- Sulistianingsih, E. (2019). Membangun sistem sumber daya manusia berbasis kompetensi dan profesional. *Jurnal Mitra Lampung*, 27.

**ANALISIS SENGKETA LAHAN DI KECAMATAN LUBUK RAJA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (PERSPEKTIF TEORI KONFLIK AGRARIA)**

Refliani Ristian¹, Taufik Akhyar, Deany Afriany³

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

E-mail : reflianiristian@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine land disputes between the community and PT. Selo Argodedali in Lubuk Raja District, Ogan Komering Ulu Regency through the perspective of agrarian conflict theory. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, literature studies, and documentation. The results of the study revealed that this dispute was triggered by a conflict of interest between residents who maintain plantation land and companies that want to use it as a road access to the mine. This conflict has become increasingly complicated due to differences in information regarding the status of the roads used and the lack of good communication between the parties involved. The government plays a role in resolving disputes through various efforts such as mediation, socialization, and policy strengthening. So it can be concluded that the land dispute between the community and the company occurred due to the incompatibility of the land ownership status for mining road access. This conflict involves several factors, such as values, interests, structure, data, and relationships. The government plays a role in resolving disputes through mediation, negotiation, and conciliation. The governor's decision to reject the mine is the main factor in resolving the dispute because with the cessation of mining operations, the community begins to no longer have problems with land.

Keywords : Agrarian Conflict, Government, Land Disputes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui sudut pandang teori konflik agraria. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sengketa ini dipicu oleh benturan kepentingan antara warga yang mempertahankan lahan Perkebunan dan perusahaan yang hendak menggunakan sebagai akses jalan menuju tambang. Konflik ini menjadi semakin rumit akibat perbedaan informasi terkait status jalan yang digunakan serta kurangnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah turut berperan dalam penyelesaian sengketa melalui berbagai upaya seperti mediasi, sosialisasi, dan penguatan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan tersebut terjadi akibat ketidaksesuaian status kepemilikan lahan untuk akses jalan tambang. Konflik ini melibatkan beberapa faktor, seperti nilai, kepentingan, struktur, data, dan hubungan. Pemerintah berperan untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, negoisasi, dan konsiliasi. Keputusan gubernur menolak tambang menjadi faktor utama dalam penyelesaian sengketa karena dengan berhentinya operasional tambang, masyarakat mulai tidak mempermasalahkan lagi mengenai lahan.

Kata Kunci : Konflik Agraria, Pemerintah, Sengketa Lahan.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun aset investasi jangka panjang. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yakni negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian. Dalam sektor ini, tanah memegang peran penting sebagai media utama untuk kegiatan produksi pertanian. Segala hal yang berkaitan dengan tanah biasanya dikaitkan dengan istilah agraria. Namun demikian, tanah seringkali menjadi sumber konflik akibat tumpang tindih kepemilikan, batas wilayah yang tidak jelas, serta perebutan hak penggunaan lahan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Dari sudut pandang teori konflik agraria, sengketa lahan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum atau administrative, melainkan juga menyangkut bagaimana kekuasaan mempengaruhi distribusi sumber daya. Teori ini memungkinkan pemahaman bahwa konflik agraria muncul akibat ketimpangan sistematis yang telah berlangsung lama, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk mengungkap akar permasalahannya.

Penelitian ini akan membahas persoalan sengketa agraria dengan menitikberatkan kajian pada kasus sengketa lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menguraikan dinamika sengketa lahan berdasarkan perspektif teori konflik agraria di wilayah tersebut. Sengketa agraria ini umumnya dikenal pula sebagai konflik pertanahan.

Berdasarkan laporan terbaru Konsorsium pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis pada Februari 2024, Indonesia mencatat jumlah konflik agraria tertinggi dibandingkan enam negara Asia lainnya, seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 241 kasus konflik agraria di Indonesia, yang berdampak pada perampasan lahan seluas 638.188 hektar, mencakup lahan pertanian, wilayah adat, dan Kawasan permukiman, serta memengaruhi sekitar 135.608 kepala keluarga. Konflik agraria ini dapat berasal dari tanah milik masyarakat adat, proyek pemerintah, maupun kegiatan Pembangunan. Jika dilihat dari jenis pelaku usaha, konflik paling banyak melibatkan perusahaan di sektor agribisnis dan Perkebunan, disusul oleh sektor pertambangan.

Salah satu kasus nyata konflik agraria terjadi di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana masyarakat setempat menghadapi persoalan lahan dengan PT. Selo Argodedali, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Konflik ini bermula pada tahun 2018, saat perusahaan mulai merencanakan eksplorasi tambang seluas 15.000

hektare dan telah mengambil alih sekitar 27 hektar lahan. Permasalahan muncul ketika perusahaan memanfaatkan jalan yang berada di atas tanah milik masyarakat sebagai akses operasional tambang, tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara pihak pemilik lahan, perusahaan, dan pihak terkait lainnya.

Konflik agraria ini melibatkan dua desa, yakni Desa Baturaden dan Battuwiningun. Warga setempat meyakini bahwa jalan yang dimanfaatkan perusahaan masih berstatus sebagai perusahaan masih berstatus sebagai tanah milik pribadi meskipun jalan tersebut pernah diperbaiki pemerintah. Di sisi lain, pihak perusahaan mengklaim telah memperoleh izin dari pemerintah setempat untuk menggunakan jalan tersebut sebagai akses menuju tambang.

Selain meneliti tentang sengketa agraria dalam perspektif teori konflik agraria, peneliti juga akan membahas upaya pemerintah dalam mengatasi sengketa tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara menyeluruh situasi sosial yang menjadi fokus kajian, dengan mencakup berbagai aspek mendalam sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan penulis dengan pihak-pihak terkait seperti dengan salah satu perwakilan pemilik lahan, perwakilan pihak perusahaan, masyarakat lainnya, dan juga pemerintah setempat. Sedangkan dokumentasi didapatkan melalui media masa yang mengunggah berita terkait.

HASIL DAN DISKUSI

Teori konflik memandang bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang saling bersaing secara intens dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks agraria, konflik seringkali berkaitan erat dengan persoalan tanah. Konflik ini umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti penguasaan lahan dan perebutan sumber daya alam. Ketegangan dalam pengelolaan sumber daya alam kerap menimbulkan benturan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha atau investor. (Hum & Lubis, 2022)

Sementara itu, Moore sengketa agraria dapat muncul dari berbagai jenis konflik, di antaranya konflik kepentingan, konflik struktural, konflik nilai, konflik hubungan, dan konflik yang berkaitan dengan data. (Hum & Lubis, 2022)

A. Sengketa Lahan dalam Perspektif Teori Konflik Agraria

Menurut penjelasan dalam buku *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, konflik agraria merupakan bentuk perselisihan yang berkaitan dengan kepemilikan serta pemanfaatan tanah. Konflik semacam ini umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti perebutan lahan dan sumber daya alam. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam menjadi salah satu pemicu utama munculnya konflik tersebut. Konflik agraria biasanya melibatkan berbagai pihak dan dipengaruhi oleh banyak regulasi, sehingga membuat permasalahannya menjadi kompleks. Ketegangan dalam pengelolaan sumber daya alam sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak investor.

1. Kronologi Sengketa Lahan

Sengketa lahan antara masyarakat dan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja merupakan salah satu contoh kasus konflik agraria. Persoalan ini mencuat sekitar tahun 2018, atau sekitar tujuh tahun yang lalu. Sengketa ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang jika ditelusuri melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, menunjukkan adanya beragam versi penjelasan. Masalah ini berawal dari rencana PT. Selo Argodedali untuk membuka tambang batu bara di area seluas 15.000 hektar. Hingga kini, perusahaan baru berhasil mengakuisisi sekitar 27 hektar lahan dari warga sekitar melalui pembelian. Namun, muncul persoalan terkait penggunaan jalan yang melintasi tanah masyarakat sebagai akses menuju lokasi tambang.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak, termasuk pemilik lahan, perwakilan perusahaan, dan tokoh masyarakat setempat seperti kepala dusun, terungkap bahwa inti permasalahan terletak pada perbedaan persepsi masing-masing pihak. Sebagian pihak berpendapat bahwa tanah yang dijadikan jalan tersebut sudah dihibahkan untuk kepentingan umum, sedangkan pihak lain menyatakan bahwa jalan itu dibangun melalui program “TNI Masuk Desa” dan diperuntukkan untuk umum, namun status kepemilikannya tetap berada di tangan warga. Sehingga permasalahan ini menyebabkan banyaknya persepsi berbeda dari masing-masing pihak.

2. Faktor Penyebab Sengketa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan serta penjabaran kronologi sengketa sebelumnya, peneliti memperoleh sejumlah informasi terkait permasalahan yang terjadi. Jika ditelaah lebih lanjut, konflik ini berawal dari rencana pembukaan tambang batubara oleh PT. Selo Argodedali. Sengketa lahan muncul akibat adanya perbedaan pandangan dan pemahaman antara

pihak-pihak terkait mengenai status jalan menuju lokasi tambang. Beberapa faktor yang turut memperumit permasalahan ini antara lain:

a. Ketidaksesuaian Status Jalan

Jalan yang menjadi sumber konflik awalnya dibangun lewat program ‘TNI Masuk Desa’ dengan dana pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dusun. Sebelumnya, jalan tersebut hanyalah jalan setapak untuk keperluan pertanian warga. Meskipun kini digunakan sebagai jalan umum, secara sertifikat tanah tersebut masih berstatus milik pribadi (warga). Masyarakat yang menolak tambang menilai jalan itu tetap milik warga, sementara pihak yang mendukung tambang menganggap jalan tersebut milik umum karena dibangun dengan dana negara.

b. Perbedaan Informasi Mengenai Status Hibah Jalan

Terdapat perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan terkait status jalan. Menurut salah satu pemilik lahan, jalan tersebut awalnya dibuat oleh PTPN 7 untuk distribusi pertanian dan dikembalikan ke warga setelah tidak digunakan lagi. Pada tahun 2018, jalan ini digunakan oleh PT. Selo Argodedali untuk akses tambang tanpa persetujuan pemilik lahan (masyarakat menolak tambang). Di sisi lain, salah satu perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa perusahaan telah mendapat izin dari pemerintah desa dan kecamatan dengan keyakinan bahwa jalan tersebut sudah dihibahkan. Ia juga menyebut awalnya masyarakat tidak keberatan, namun sikap mereka kemudian berubah tanpa alasan yang jelas.

c. Tidak Adanya Kesepakatan yang Jelas antara Pihak yang Terlibat

Permasalahan semakin rumit karena tidak adanya kesepakatan tertulis antar masyarakat, pemerintah, dan perusahaan terkait penggunaan jalan sehingga memunculkan berbagai tafsir mengenai hak atas lahan tersebut. Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, yang dalam pernyataannya kepada media fornews.co menyebutkan bahwa jalan tersebut belum pernah dihibahkan secara resmi kepada desa atau pihak manapun.

3. Analisis dalam Perspektif Teori Konflik Agraria

Dari sudut pandang teori konflik agraria, sengketa di Kecamatan Lubuk Raja mencerminkan jenis konflik yang sering terjadi di daerah dengan perubahan fungsi lahan, khususnya dari pertanian ke industri. Sengketa lahan erat kaitannya dengan politik agraria, yang berperan dalam menetapkan kepemilikan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik atas tanah. Pemerintah sebagai bagian dari politik agraria memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan tata guna lahan untuk

melindungi hak masyarakat. Menurut Moore dalam buku *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif* karya Dr. Isnaini dan Anggraeni A.Lubis menjelaskan konflik semacam ini dapat dikategorikan ke dalam lima jenis utama.

a. Konflik Kepentingan

Konflik ini muncul karena adanya konflik kepentingan dalam berbagai aspek, seperti hak atas tanah, prosedur, dan aspek psikologis. Masyarakat menggantungkan hidup pada lahan untuk Perkebunan karet sedangkan perusahaan melihatnya sebagai sumber batu bara yang bernilai ekonomi. Selain itu, konflik kepentingan juga terlihat dalam proses, di mana masyarakat merasa tidak dilibatkan secara menyeluruh sementara perusahaan mengklaim telah mengikuti aturan. Minimnya komunikasi memperparah konflik karena masing-masing pihak merasa kepentingannya tidak diakomodasi secara merata.

b. Konflik Struktural

Konflik struktural dalam kasus ini terjadi karena ketimpangan kekuasaan dan akses sumber daya antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan sebagai pemilik modal memiliki *power* yang lebih kuat dalam konteks pengurusan perizinan jika sudah mengikuti SOP yang berlaku sedangkan masyarakat sendiri mempertahankan hak mereka. Ketegangan makin meningkat akibat klaim sepihak perusahaan terhadap jalan milik warga bahwasanya perusahaan sudah mendapatkan izin pemerintah dan juga adanya alat berat yang masuk ke wilayah memicu aksi protes. Secara geografis, rencana tambang di wilayah Perkebunan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan pertanian.

c. Konflik Nilai

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan prinsip dan pandangan antara masyarakat dan perusahaan. Masyarakat memandang tanah sebagai warisan leluhur dan sumber penghidupan jangka panjang yang harus dijaga sementara perusahaan melihatnya sebagai aset ekonomi yang dapat lebih produktif lagi melalui batu bara. Perbedaan ini menciptakan ketegangan, terutama ketika nilai-nilai lokal tentang pelestarian lingkungan dan keberlanjutan bertentangan dengan orientasi perusahaan.

d. Konflik Hubungan

Konflik hubungan muncul karena perbedaan persepsi, komunikasi yang kurang efektif, serta interaksi yang kurang harmonis antara masyarakat dan PT. Selo Argodedali. Sejak awal, proses sosialisasi berjalan dengan kurang baik sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hal ini,

konflik hubungan tidak hanya menunjukkan adanya pertentangan tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

e. **Konflik Data**

Konflik data terjadi karena adanya perbedaan informasi dan interpretasi mengenai status jalan menuju tambang. PT. Selo Argodedali mengklaim telah mendapatkan izin penggunaan jalan dari pemerintah desa yang menyatakan jalan itu sudah dihibahkan. Namun, masyarakat menegaskan bahwa secara sertifikat, jalan tersebut masih merupakan tanah hak milik warga sehingga memunculkan konflik data dalam penyampaian dan pemahaman informasi.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan mengenai sengketa lahan atau permasalahan mengenai tanah di Kecamatan Lubuk Raja ini terjadi sesuai dengan pendapat menurut Moore, dimana menjelaskan bahwa sengketa pertanahan bermula dari beberapa konflik seperti konflik kepentingan, struktural, nilai, hubungan, dan juga data.

B. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Sengketa Lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penyelesaian sengketa agraria merupakan tanggungjawab penting yang diemban oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah memegang peran strategis untuk menangani berbagai konflik lahan yang kerap muncul akibat klaim atas kepemilikan maupun pemanfaatan lahan. Pemerintah dituntut untuk menjalankan kebijakan pengelolaan lahan secara transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat. Ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya seperti air, tanah, dan udara diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Makna “dikuasai oleh negara” merujuk pada wewenang yang diberikan kepada negara untuk mengatur, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam praktiknya, penguasaan ini diwujudkan melalui pembuatan regulasi yang bertujuan mengarahkan dan mengendalikan tata Kelola sumber daya alam. Selain itu, negara juga berwenang menyelesaikan berbagai konflik yang berkaitan dengan agraria, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.

Terkait penyelesaian sengketa lahan di Kecamatan Lubuk Raja, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah

setempat menerapkan berbagai strategi dalam menangani konflik tersebut. Misalnya, Kepala Desa Battuwintangun melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia menyatakan bahwa akan mendukung Keputusan masyarakat; jika masyarakat menolak, maka pihak desa pun tidak akan mengizinkan perusahaan untuk beroperasi di wilayah tersebut. Selain itu, perwakilan DPRD OKU Komisi I periode 2014-2019 juga menyampaikan bahwa sikapnya didasari oleh rasa cinta terhadap lingkungan Batumarta sehingga ia menolak keberadaan tambang sebagai bentuk perlindungan terhadap wilayah tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru yang turut menolak keberadaan tambang batu bara tersebut. Penolakan dari berbagai pihak inilah yang akhirnya membuat perusahaan menghentikan operasinya dan meredakan konflik yang terjadi.

Proses mediasi sengketa lahan di Kecamatan Lubuk Raja difasilitasi oleh anggota DPRD OKU periode 2014-2019. Mediasi dilakukan di kantor DPRD OKU sebagai forum resmi pembahasan. Masyarakat yang menolak tambang hadir dan tetap pada pendiriannya untuk menolak penggunaan lahan milik warga sebagai akses jalan menuju tambang. Proses mediasi berjalan lancar karena pemerintah dan Gubernur Sumatera Selatan, turut mendukung aspirasi masyarakat.

Upaya negosiasi pun dilakukan, namun hanya melibatkan masyarakat yang mendukung tambang. Sementara itu, warga yang menolak termasuk pemilik lahan enggan ditemui dan menolak proses negosiasi. Karena adanya penolakan ini, tidak tercapai kesepakatan menyeluruh. Meski begitu, perusahaan menyatakan telah berupaya melakukan negosiasi seperti jika jalan tersebut rusak akan selalu diperbaiki terus menerus. DPRD OKU kemudian berperan sebagai penengah dengan mempertemukan semua pihak dalam bentuk konsiliasi. Keputusan akhir memihak masyarakat penolak tambang, dengan dihentikannya operasional perusahaan di wilayah tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi warga.

Tidak disebutkan adanya arbitrase formal dalam permasalahan ini karena penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mediasi dan Keputusan pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam permasalahan yang melibatkan masyarakat dengan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja ini lebih banyak mengandalkan mediasi dan konsiliasi dengan DPRD sebagai fasilitator. Negosiasi terjadi secara terbatas karena hanya melibatkan pihak yang pro-tambang tanpa adanya warga yang lahannya digunakan tanpa persetujuan pemiliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Selo Argodedali, dapat disimpulkan bahwa sengketa lahan antara warga dan PT. Selo Argodedali di Kecamatan Lubuk Raja disebabkan oleh ketidaksesuaian status kepemilikan jalan tambang dan perbedaan informasi yang didapatkan berbeda. Dalam teori konflik agraria, konflik ini mencakup lima aspek yaitu konflik kepentingan terkait perbedaan penggunaan lahan, konflik struktural akibat ketimpangan akses sumber daya, konflik nilai karena pandangan berbeda atas fungsi lahan, konflik hubungan karena komunikasi yang kurang baik, serta konflik data karena informasi status lahan yang tidak sejalan. Selanjutnya, pemerintah berperan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, negosiasi terbatas, dan konsiliasi. Penolakan tambang oleh gubernur Sumatera Selatan menjadi kunci meredakan konflik, disusul dukungan dari Kepala Desa Battuwintangun dan DPRD OKU yang mengakomodasi aspirasi warga. Penyelesaian lebih banyak mengandalkan mediasi dan konsiliasi sesuai UU No. 30 Tahun 1999. Upaya ini menekankan pentingnya kebijakan pertanahan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashady, Suhefihusnaini;. (2022). Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur. *Kompilasi Hukum*.
- Boboy, Juwita Tarochi; Santoso, Budi; , Irawati;. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin. *Notarius*.
- Dewi, S. A. K., & Hasibuan, R. P. P. M. (2021). Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 309. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24474>
- Dirgantara, Imam Agung;. (2021). Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi Antara PT. Able Commodities Indonesia Dengan Warga Sekitar Dalam Hal Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi di Koramil 10/Medan Labuhan Berdasarkan Nota Kesepahaman No. 001/NK/VIII/2017).

Refliani Ristian, Taufik Akhyar, Deany Afriany, *Analisis Sengketa Lahan di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu (Perspektif Teori Konflik Agraria)*, JSIPOL, Vol. 4 Issue. 2 No.4, April 30, 2025

Fauziah, Umi;. (2022). *Strategi Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus : Konflik Agraria Antara PT. Saml Dengan Masyarakat Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. Palembang.

Ihyamuis, M. dkk. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 30(Sengketa Pertambangan), 1–14.
<http://www.suarapembaruan.com/news/2003/09/17/masyarakat->

Isnaini, Anggreni A.Lubis. (2022). *Hukum Agraria*. Medan.

Mediasi, J., Penyelesaian, D., Pertanahan, S., Dorongan, S., Hak, P., Manusia, A., Chandra Arwana, Y., Arifin, R., & Kunci, K. (2019). “*Mediation on Land Disputes Settlement on Promoting Human Rights Fulfillment*” *Info Artikel Abstrak*.
<http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV1>

Rahman, Arief;. (2019). *Politik Agraria*. Jambi: Salim Media Indonesia.

Rahman, R., Sosiologi, P., Uin, A., & Makassar, A. (2017). *KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT)*.

Raja, Nur Azizah;. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP London Sumatera dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Ilmu Pemerintahan*.

Susilo, D. A. (2022). *PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN KEBUMEN (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu)*.

Tim Dosen STSNU Nusantara. (2018). *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. *Arbitrase*, 1–270.

Wisudawan, I Gusti Agung; Ismail, Sumiati; Suhartana, I Wira Pria; Maulada, Diman Ade;. (2019). Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis (Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat). *Kompilasi Hukum*.

Verawati, R., Vania, W., Salshadilla, R., & Al-Fatih, S. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. *Expspose* , 19(Penyelesaian Sengketa Agraria), 1109–1121.